

**STRATEGI PARTAI GERINDRA DALAM MENINGKATKAN
KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN
LEGISLATIF 2024 STUDI KASUS: PD PIRA GERINDRA
LAMPUNG**

SKRIPSI

Oleh

DHEA ELSYA FANIRA

2216021104



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

STRATEGI PARTAI GERINDRA DALAM MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2024 STUDI KASUS : PD PIRA GERINDRA LAMPUNG

Oleh

DHEA ELSYA FANIRA

Keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya di tingkat daerah, masih menjadi tantangan dalam demokrasi Indonesia meskipun kebijakan afirmatif telah diterapkan. Partai politik memiliki peran strategis dalam mendorong keterlibatan perempuan melalui kaderisasi, dukungan struktural, dan penguatan organisasi sayap perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis strategi PIRA Gerindra Lampung dalam meningkatkan partisipasi dan keterpilihan perempuan pada Pemilu Legislatif 2024 melalui sayap partai nya PIRA.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori strategi kesetaraan gender yang meliputi strategi inklusi (*inclusion*), pembalikan (*reversal*), dan pengarusutamaan gender (*mainstreaming*). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus PIRA, akademisi dan Kaukus Politik Perempuan Indonesia di Provinsi Lampung. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi inklusi dilakukan melalui pemenuhan kuota perempuan, namun belum berdampak signifikan terhadap keterpilihan. Pada dimensi pembalikan, PIRA menjadi ruang penguatan kapasitas dan jaringan politik perempuan, tetapi pengaruhnya terhadap keputusan strategis partai masih terbatas. Sementara itu, pengarusutamaan gender belum terintegrasi secara menyeluruh dalam kebijakan dan budaya organisasi partai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi peningkatan keterwakilan perempuan oleh PIRA Gerindra Lampung belum berjalan terpadu sehingga diperlukan integrasi strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan secara substantif.

Kata Kunci : Keterwakilan Perempuan, Partai Politik, PIRA Gerindra, Strategi Kesetaraan Gender, Pemilu 2024.

ABSTRACT

GERINDRA PARTY STRATEGY IN INCREASING WOMEN'S REPRESENTATION IN THE 2024 LEGISLATIVE ELECTIONS CASE STUDY: PD PIRA GERINDRA LAMPUNG

By

DHEA ELSYA FANIRA

Women's representation in politics, particularly at the regional level, remains a challenge in Indonesian democracy, despite the implementation of affirmative action policies. Political parties have a strategic role in encouraging women's involvement through cadre development, structural support, and strengthening women's wing organizations. Therefore, this study analyzes the strategy of the Gerindra Party (PIRA) Lampung in increasing women's participation and electability in the 2024 Legislative Elections through its party wing, PIRA.

This study uses a theoretical framework of gender equality strategies, including inclusion, reversal, and gender mainstreaming strategies. The research method used was qualitative, with data collected through interviews, observation, and documentation with PIRA administrators, academics, and the Indonesian Women's Political Caucus in Lampung Province. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results indicate that the inclusion strategy, implemented through fulfilling women's quotas, has not had a significant impact on electability. In the reversal dimension, PIRA provides a space for strengthening women's political capacity and networks, but its influence on the party's strategic decisions remains limited. Meanwhile, gender mainstreaming has not been fully integrated into the party's policies and organizational culture. This study concludes that the strategy to increase women's representation by PIRA Gerindra Lampung has not been implemented cohesively, requiring strategic integration to substantively increase women's representation.

Keywords: *Women's Representation, Political Parties, PIRA Gerindra, Gender Equality Strategy, 2024 Election.*

**STRATEGI PARTAI GERINDRA DALAM MENINGKATKAN
KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2024
STUDI KASUS: PD PIRA GERINDRA LAMPUNG**

Oleh

DHEA ELSYA FANIRA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **STRATEGI PARTAI GERINDRA DALAM
MENINGKATKAN KETERWAKILAN
PEREMPUAN PADA PEMILIHAN
LEGISLATIF 2024 STUDI KASUS: PD
PIRA GERINDRA LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Dhea Elsyia Fanira**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2216021104**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Prof. Arizka Warganegara, Ph.D
NIP.198106202006041003

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.
NIP. 197106042003122001

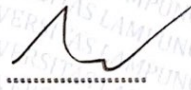
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Arizka Warganegara, Ph.D.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197508212000031001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **13 Maret 2026**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Maret 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Dhea Elsy Fanira
2216021104

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dhea Elsy Fanira yang lahir di Lakaran, pada 23 April 2005. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Herlina dan Suryadi Putra. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Paud Nurul Islam Wonosobo pada tahun 2008, dilanjutkan dengan TK ABA di Wonosobo tahun 2009, SDN 1 Wonosobo pada tahun 2010 sampai dengan 2015, MTSN1 Tanggamus tahun 2016 MAS Diniyyah Putri Lampung *Islamic Boarding School* Negeri Sakti, Pesawaran tahun 2019 dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik. Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan, penulis aktif terlibat dalam berbagai kegiatan akademik maupun nonakademik sebagai bentuk upaya pengembangan kapasitas diri. Pada tahun 2023, penulis bergabung dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung dan berperan di Divisi Kementerian Luar Negeri. Pada tahun 2025, penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 30 hari di Desa Tanjung Pandan, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, penulis juga mendapatkan kesempatan mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama enam bulan di DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung.

MOTTO

“ Allah tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya ”

(Q.S Al – Baqarah : 286)

“ Sesuatu yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan ”

*“ Everything will be fine, everything will pass. Hard times will end, and new experiences will take their place, both joyful and challenging.
So keep your head up! ”*

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan ”

(Q.S Al – Insyirah : 5 – 6)

“ God have perfect timing, never early, never late, It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it's a worth the wait”

PERSEMBAHAN

Rasa Puji syukur yang mendalam kepada Allah SWT,
Alhamdulillahirabbil'alamiin telah diselesaikannya Skripsi ini yang penulis
persembahkan kepada

Kedua orangtua yang sangat kucintai dan kusayangi, tidak sedikitpun langkah
yang penulis jalani sampai hari ini tanpa adanya perjuangan dari Ayah dan Ibu

Suryadi Putra & Herlina

Bahkan kata – kata sederhana ini tidak mampu menggambarkan besarnya
perasaan terimakasih yang penulis ingin sampaikan.

Terimakasih atas setiap tetes keringat, do'a – do'a yang dipanjatkan serta
setiap dukungan yang penulis dapatkan selama ini

Terimakasih kepada keluarga, sahabat dan pihak – pihak yang banyak membantu
dan mendoakan dalam proses penyusunan skripsi ini, semoga kebaikan dan
ketulusan kalian mendapatkan balasan dari Allah SWT

Almamater yang penulis cintai dan banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang maha pengasih dan penyayang atas rahmat dan karunianya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini dengan judul **“Strategi Partai Gerindra Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan pada Pemilihan Legislatif 2024 Studi Kasus: PIRA Gerindra Lampung”** Shalawat serta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama kita dalam menuntut ilmu dan membina akhlak yang mulia, *Allâhumma shalli 'alâ sayyidinâ Muhammadin wa 'alâ âlihi washahbihi ajma'in* .

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang sarjana. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa perjalanan penelitian hingga penulisan skripsi tidak selalu berjalan dengan mudah. Berbagai tantangan, hambatan, serta keterbatasan yang dihadapi selama proses tersebut menjadi pengalaman berharga yang memberikan banyak pelajaran bagi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki. Namun, skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui sanwacana ini penulis dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dengan ini ucapan terimakasih sedalam – dalamnya penulis ucapkan kepada

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustiana Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan dosen Pembimbing Akademik;
4. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
5. Bapak Prof. Arizka Warganegara, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Utama. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga sangat menghargai kesediaan Bapak yang senantiasa meluangkan waktu untuk dihubungi maupun ditemui di tengah berbagai kesibukan yang ada. Ketelitian, kesabaran, serta perhatian yang Bapak berikan menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta kebahagiaan oleh Allah Swt;
6. Ibu Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A selaku Dosen Penguji yang juga dikenal sebagai akademisi dan pakar di bidang gender dan politik. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ibu dalam memberikan berbagai masukan, kritik, serta saran yang sangat konstruktif selama proses penyempurnaan skripsi ini. Berbagai pandangan, pemikiran, dan arahan yang diberikan tidak hanya membantu penulis dalam memperbaiki kualitas penelitian, tetapi juga memperkaya wawasan penulis, khususnya dalam memahami kajian gender dalam perspektif politik. Penulis juga sangat menghargai kesediaan Ibu yang tetap meluangkan waktu untuk dihubungi di tengah berbagai kesibukan akademik yang dijalankan. Semoga segala kebaikan, ilmu, serta dedikasi yang Ibu berikan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT, serta senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Meskipun tidak dapat disebutkan satu

per satu, hal tersebut tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan penulis kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta pengalaman akademik selama masa perkuliahan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, kesabaran, dan komitmen dalam mendidik serta membimbing mahasiswa, sehingga penulis dapat memperoleh pengetahuan, wawasan, dan pembelajaran yang sangat berharga hingga dapat mencapai tahap ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta limpahan kebaikan oleh Allah SWT dalam setiap langkah pengabdian dan pengajaran yang dijalankan;

8. Kepada seluruh Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, khususnya dalam berbagai hal yang berkaitan dengan proses administrasi selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Penulis juga sangat menghargai sikap ramah, kesabaran, serta kesediaan Bapak dan Ibu staf yang selalu membantu dan memberikan arahan dengan baik, bahkan ketika penulis melakukan kesalahan dalam proses administrasi. Bimbingan dan bantuan yang diberikan menjadi hal yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan berbagai keperluan akademik. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap pekerjaan, serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT;
9. Bang Anggi Arif Wibowo selaku mentor magang penulis di DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung. Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar - besarnya atas arahan, bimbingan, serta dukungan yang telah diberikan selama penulis menjalani proses magang. Melalui berbagai diskusi, pengamatan lapangan, serta pengalaman yang diperoleh selama kegiatan magang tersebut, penulis mendapatkan banyak wawasan dan sudut pandang baru yang kemudian menjadi salah satu inspirasi serta titik awal dalam memunculkan gagasan penelitian hingga akhirnya berkembang menjadi judul skripsi ini. Ilmu, pengalaman, serta kepercayaan yang diberikan menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis dalam memahami dinamika praktik politik secara langsung. Selain itu juga terimakasih kepada Pak

jambronk selaku ketua sekretariat DPD Gerindra Lampung, semua staff diantaranya bang darmawan, bang panji, bang tri, mas edi, mas deni serta tim PIP ibu Mayang Suri Djausal yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mendapatkan pengalaman.

10. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dari PIRA Gerindra Lampung dan akademisi yang telah meluangkan waktu serta memberikan informasi, pandangan, dan data yang sangat bermanfaat bagi kelengkapan penelitian ini, yaitu Ibu Elly Wahyuni, Ibu Asdiana Hansayupa, Ibu Wulan Purnama Sari, Ibu Aderly Imelia Sari, dan Prof Nirva Diana yang memberikan pandangan serta informasi yang sangat berarti dalam memperkaya data dan memperdalam analisis yang penulis lakukan. Semoga segala kebaikan, ilmu, serta pengalaman yang telah diberikan menjadi amal jariyah bagi narasumber;
11. Teruntuk Ibuku Herlina dan Ayah Suryadi Putra yang sangat penulis cintai. Terima kasih atas segala ketulusan, perhatian, serta kekuatan yang selalu diberikan kepada penulis sepanjang perjalanan hidup ini. Tanpa doa dan dukungan yang senantiasa mengiringi, penulis tidak akan mampu sampai pada tahap ini. Setiap usaha dan perjuangan yang penulis lakukan selalu terasa lebih ringan karena adanya kepercayaan dan kasih sayang dari Ibu dan Ayah. Sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, penulis menyadari bahwa banyak harapan dan tanggung jawab yang turut menyertai setiap langkah yang diambil. Oleh karena itu, pencapaian ini penulis dedikasikan sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah menjadi sumber semangat dan tempat penulis belajar tentang arti kerja keras dan ketulusan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta kebahagiaan kepada Ibu dan Ayah;
12. Terimakasih kepada adik – adikku tercinta Vina dan Uci, yang selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Kehadiran kalian memberikan warna, semangat, serta kebahagiaan tersendiri di tengah berbagai proses yang penulis jalani. Meskipun sering kali disibukkan dengan aktivitas masing-masing, dukungan, perhatian, dan kebersamaan yang terjalin di antara kita selalu menjadi penguat bagi penulis untuk terus berusaha menyelesaikan

pendidikan ini. Semoga kita semua dapat terus saling mendukung, membanggakan kedua orang tua, serta meraih impian dan masa depan yang terbaik;

13. Kepada Kakek dan Nenek yang amat penulis sayangi, kakek Hasan Basri, nenek Masroh, kakek Alm Burhan dan nenek Runtah terimakasih atas kasih sayang dan perlakuan yang tidak pernah berubah sedari kecil, terimakasih selalu senang menyambut kepulangan penulis meskipun tidak selalu bertemu namun dukungan, do'a serta harapan yang diberikan dapat selalu penulis rasakan;
14. Kepada teman – teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan khususnya kepada Ardina, Nazma, Dina dan Rora. Terimakasih atas setiap bantuan, dukungan dan kebersamaan yang telah diberikan sejak hari pertama kita bertemu, terimakasih telah menjadi salah satu penyemangat melalui setiap canda tawa selama ini, setiap kebersamaan kita saat dikelas, mengerjakan tugas, bahkan saat kita sedang tidak baik – baik saja, semoga kita semua bisa mencapai setiap harapan dan Impian yang sudah pernah kita ceritakan selama ini, selanjutnya aku berharap meskipun kita sudah tidak saling bertemu semoga pertemanan ini berlanjut sampai nanti.
15. Kepada sahabat – sahabatku sejak SMA di Diniyyah Putri Lampung, Tata, Wiranda, Adel, Viola, Nabila, Rodiani, Aulia, dan Nadia. Terimakasih sudah mau menjadi sahabat penulis, terimakasih atas setiap kata – kata yang menguatkan penulis untuk menyelesaikan ini sampai akhir, untuk setiap waktu yang selalu diusahakan untuk bertemu meskipun dengan berbagai kesibukan yang ada, bahkan berbeda negara sekalipun tidak menghalangi persahabatan yang kita jalani. Penulis merasa sangat beruntung dikelilingi oleh orang – orang yang baik dan membanggakan seperti kalian semua, semoga persahabatan ini berlanjut sampai selama – lamanya;
16. Teruntuk sahabat sejak SMP ku, Indah, Tiara dan Zahra terimakasih sudah mau membersamai penulis sampai dengan hari ini, terimakasih atas dukungan dan doa – doa yang diberikan kepada penulis, meskipun seringkali dipisahkan oleh jarak dan waktu semoga kita senantiasa bisa menjaga pertemanan ini dan semoga hal – hal baik selalu menyertai kalian;

17. Teruntuk teman – teman magang di DPD Gerindra Lampung, Intan, Vriska, Yoga dan Ari, terimakasih sudah banyak sekali membantu dan kebersamai penulis, terimakasih atas setiap canda tawa selama proses magang berlangsung, bahkan saat kita sudah mulai untuk menyelesaikan proses skripsi ini. Semoga kita semua sehat dan bisa mencapai Impian yang sedang kita perjuangkan;
18. Teruntuk teman – teman KKN desa Tanjung Pandan, Danu, Apri, Dian, Abdi, Nabilah dan Septi terimakasih atas pengalaman berharga yang telah penulis dapatkan selama 1 bulan KKN berlangsung, banyak sekali suka dan duka sudah kita Jalani, meskipun sekarang tidak selalu bertemu seperti dulu namun penulis selalu berharap hal – hal baik selalu menyertai kita semua. Dan kepada Bapak Ibu Lurah & Sekretaris Desa, Warga desa serta pihak – pihak yang membantu penulis selama proses KKN di desa Tanjung Pandan, tanpa bantuan dan kebaikan kalian penulis dan rekan – rekan tidak dapat melewati setiap proses KKN yang ada, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian;
19. Dan yang terakhir, Kepada diriku sendiri Dhea Elsyia Fanira, Terima kasih kepada diri sendiri yang telah berani memulai perjalanan panjang ini, yang tetap berusaha berdiri ketika keadaan terasa berat, serta yang terus mencoba meskipun sering kali dihadapkan pada rasa takut dan ketidakpastian. Setiap proses yang dilalui, baik suka maupun duka, telah menjadi bagian penting yang membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih kuat, dan lebih menghargai setiap proses dalam kehidupan. Perjalanan ini mengajarkan bahwa tidak semua hal harus berjalan sempurna, namun selama seseorang terus berusaha dan tidak berhenti melangkah, maka selalu ada jalan untuk sampai pada tujuan. Pencapaian ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi penulis, hal ini merupakan hasil dari perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan penghargaan kepada diri sendiri karena telah mampu melewati setiap proses tersebut dengan sebaik mungkin. Semoga langkah kecil ini dapat menjadi pengingat bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah sia-sia, serta menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar dan lebih bermakna di masa yang akan datang.

20. Penulis juga menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan penulis kepada semuanya. Semoga segala bentuk kebaikan, perhatian, serta dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT.

Sebagai penutup, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi tambahan pengetahuan bagi berbagai pihak, khususnya dalam pengembangan kajian ilmu politik dan pemerintahan. Penulis juga berharap karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kegiatan akademik, baik dalam proses pembelajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat, terutama di lingkungan Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Maret 2026
Penulis,

Dhea Elsyia Fanira

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Strategi	12
2.2 Tinjauan Partisipasi Politik	20
2.2.1 Bentuk – Bentuk Partisipasi Politik.....	22
2.2.2 Partisipasi Politik Perempuan	23
2.3 Tinjauan Partai Politik.....	24
2.3.1 Fungsi Partai Politik	25
2.3.2. Peran Partai Politik	26
2.4 Kerangka Pikir.....	26
III. METODE PENELITIAN	30
3.1 Tipe Penelitian.....	30
3.2 Lokasi Penelitian	33
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Informan	35
3.5 Jenis & Sumber Data	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data	39
3.7 Teknik Pengolahan Data	41
3.8 Teknik Analisis Data	44
3.9 Pengujian Keabsahan Data	45
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Gambaran Umum	48
4.1.1 Profil Partai Gerindra.....	48
4.1.2 Kepengurusan Partai Gerakan Indonesia Raya.....	49

4.1.3 Organisasi Sayap Partai Gerindra.....	52
4.1.4 Perempuan Indonesia Raya (PIRA).....	52
4.1.4 Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) PILEG 2024.....	54
4.2 Hasil Penelitian.....	56
4.2.1 Inclusion Strategy.....	57
4.2.2 Reversal Strategy.....	69
4.2.3 Mainstreaming Strategy.....	77
4.3 Pembahasan.....	88
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	106
5.1 Simpulan.....	106
5.2 Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	113

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Hasil Pemilu Legislatif Provinsi Lampung 2019-2024.....	3
Tabel 2 Perolehan Suara DPR RI & DPD RI Tahun 2014 – 2024	4
Tabel 3 Strategi Kesetaraan Gender Menurut Squires (2007)	17
Tabel 4 Strategi Kesetaraan Gender Menurut Para Ahli.....	19
Tabel 5 Fokus Penelitian.....	34
Tabel 6 Informan.....	36
Tabel 7 Susunan Pengurus DPP Gerindra.....	50
Tabel 8 Susunan Pengurus DPD Gerindra Lampung.....	51
Tabel 9 Susunan Pengurus PD PIRA Lampung.....	53
Tabel 10 Susunan Pengurus Inti Sayap Partai	59
Tabel 11 Triangulasi Sumber Dimensi Inklusi	67
Tabel 12 Triangulasi Sumber Dimensi <i>Reversal Strategy</i>	75
Tabel 13 Rekap Target & Capaian Keterwakilan PIRA 2024	84
Tabel 14 Triangulasi Sumber Dimensi <i>Mainstreaming Strategy</i>	86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pikir.....	29
Gambar 2 DCT CALEG 2024.....	56
Gambar 3 Kegiatan Membangun Relasi Sosial	59
Gambar 4 Kegiatan <i>Workshop</i> & Pendidikan Politik	63
Gambar 5 Terlibat aktif dalam Kegiatan Partai	66
Gambar 6 Sosialisasi MBG oleh PIRA.....	71
Gambar 7 Bakti Sosial	72
Gambar 8 Berbagi Takjil.....	72
Gambar 9 Membangun Jaringan Sosial	73
Gambar 10 Keterwakilan PIRA di tingkat Kabupaten/Kota.....	85
Gambar 11 Pembahasan <i>Inclusion Strategy</i>	91
Gambar 12 Pembahasan <i>Reversal Strategy</i>	95
Gambar 13 Pembahasan <i>Mainstreaming Strategy</i>	99

DAFTAR SINGKATAN

AD/ART	: Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga
ALEG	: Anggota Legislatif
BPS	: Badan Pusat Statistika
CALEG	: Calon Legislatif
DCT	: Daftar Calon Tetap
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GEKIRA	: Gerakan Kristiani Indonesia Raya
GEMIRA	: Gerakan Muslim Indonesia Raya
GERINDRA	: Gerakan Indonesia Raya
IPU	: <i>Inter-Parliamentary Union</i>
JARI RAYA	: Jaringan Rakyat Indonesia Raya
KESIRA	: Kesehatan Indonesia Raya
KPPI	: Kaukus Politik Perempuan Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MBG	: Makan Bergizi Gratis
PAPERA	: Pedagang Pejuang Indonesia Raya
PD	: Pimpinan Daerah
PILEG	: Pemilihan Legislatif
PIRA	: Perempuan Indonesia Raya
PPIR	: Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya
SATRIA	: Satuan Relawan Indonesia Raya
TIDAR	: Tunas Indonesia Raya

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks demokrasi modern saat ini, partisipasi perempuan dalam ranah politik menjadi salah satu parameter penting untuk menilai sejauh mana kualitas demokrasi suatu negara dapat berjalan secara inklusif dan berkeadilan. Seperti yang dikemukakan oleh *inter-Parliamentary Union* (Darmastuti, 2017:3) *The achievement of democracy presupposes a genuine partnership between men and women in the conduct of the affairs of society in which they work in equality and complementarity, drawing mutual enrichment from their differences.* (Pencapaian tujuan demokrasi mensyaratkan sebuah kemitraan yang sungguh sungguh antara laki laki dan Perempuan untuk melaksanakan berbagai urusan kemasyarakatan dalam kondisi saling bekerja sama secara setara dan saling melengkapi, dengan saling memperkaya atas dasar perbedaan yang ada di antara mereka).

Demokrasi yang sehat seharusnya tidak hanya memberikan ruang bagi kelompok mayoritas atau pihak-pihak tertentu saja, melainkan memastikan bahwa seluruh warga negara tanpa terkecuali baik laki-laki maupun perempuan, terlepas dari perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun agama memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Keterlibatan perempuan dalam dunia politik memiliki peran strategis, tidak hanya sebatas sebagai bentuk pemenuhan hak politik warga negara, tetapi juga sebagai upaya untuk menghadirkan perspektif yang lebih beragam dan representatif dalam menentukan arah kebijakan publik. Peran perempuan dalam kehidupan politik sangat penting karena berhubungan langsung dengan kualitas demokrasi. Jika kualitas demokrasi turut ditentukan oleh tingkat partisipasi perempuan dalam politik, dan partisipasi tersebut bergantung pada peran partai

politik, maka perlu dipahami bagaimana posisi perempuan dalam struktur dan hubungan kekuasaan di dalam partai politik Darmastuti (2017).

Indonesia sebagai negara demokrasi terus berupaya mendorong peningkatan peran serta perempuan dalam kancah politik nasional maupun daerah. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mewajibkan partai politik menyediakan ruang partisipasi yang proporsional bagi perempuan, khususnya dalam proses rekrutmen dan pencalonan anggota legislatif di setiap pemilihan umum. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 245 dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa setiap partai politik peserta pemilu diwajibkan menyusun daftar calon anggota legislatif dengan memenuhi minimal 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan.

Kebijakan ini tidak hanya menjadi langkah strategis untuk mendorong kesetaraan gender dalam politik Indonesia, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mendukung agenda pembangunan global yang diatur dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya pada poin kelima yang menargetkan tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh bidang kehidupan, termasuk di bidang politik dan pengambilan keputusan publik, Rakhmawati (2024). Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan partai politik dapat lebih serius dalam membina, merekrut, serta memberikan ruang yang layak bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam proses politik, sehingga keberadaan mereka bukan lagi sekadar pelengkap administratif, melainkan menjadi aktor penting yang turut menentukan arah pembangunan bangsa ke depan.

Berdasarkan laporan *Inter-Parliamentary Union (IPU)* tahun 2023 yang memantau perkembangan parlemen di 66 lembaga legislatif dari 52 negara, perempuan menempati sekitar 27,6% kursi parlemen, meningkat 1,4 poin persentase dibandingkan pemilihan sebelumnya. Meski menunjukkan kemajuan, angka tersebut masih di bawah target ideal 30% keterwakilan perempuan yang menjadi standar internasional untuk representasi politik yang setara di Negara Indonesia. Di

Indonesia, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif nasional juga belum mencapai angka tersebut, mencerminkan masih terbatasnya ruang politik substantif bagi perempuan, Purnamasari (Rakhmawati 2024, *Inter-Parliamentary Union*, 2023).

Implementasi aturan ini di tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala. Provinsi Lampung, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Pulau Sumatera, turut menghadapi problem serupa. Berdasarkan hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung untuk hasil Pemilu Legislatif 2024, dari total 85 kursi DPRD Provinsi Lampung, hanya 18 kursi yang berhasil diduduki oleh perempuan. Jika dipersentasekan, angka tersebut hanya mencapai sekitar 21,17%, masih jauh di bawah target minimal kuota 30% yang telah diatur dalam regulasi. Meskipun angka ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, kesenjangan representasi gender dalam lembaga legislatif masih menjadi persoalan yang signifikan di Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam daftar calon tetap belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi keterwakilan nyata di parlemen.

Tabel 1 Hasil Pemilu Legislatif Provinsi Lampung 2019-2024

Tahun	Total Kursi	Jumlah Perempuan	Presentase
2019	85	15	17,64 %
2024	85	18	21,17%

Sumber : KPU LPG 2024

Kondisi ini menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam politik daerah, khususnya di Provinsi Lampung, masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Selain persoalan budaya politik yang masih cenderung patriarkis, keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya politik, serta belum optimalnya komitmen partai politik dalam mengakomodasi perempuan dalam daftar calon legislatif menjadi faktor penyebab rendahnya keterwakilan tersebut. Oleh karena itu, ke depan diperlukan strategi khusus yang lebih serius dari berbagai pihak, baik

pemerintah daerah, partai politik, maupun organisasi masyarakat sipil untuk mendorong peningkatan jumlah perempuan di parlemen, guna mewujudkan politik yang lebih inklusif dan representatif di tingkat lokal.

Secara nasional, keterwakilan perempuan dalam parlemen Indonesia masih belum mencapai angka ideal 30% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU 2019), dari total 575 anggota DPR RI periode 2019–2024, hanya 112 orang atau sekitar 19,48% yang merupakan perempuan. Persentase ini memang meningkat dibandingkan hasil Pemilu 2014 yang mencapai 17,32%, namun masih jauh dari target yang diharapkan. Kondisi serupa juga terjadi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), dimana dari 136 kursi yang tersedia, hanya 42 diisi oleh perempuan atau sekitar 30,88%. Meskipun mendekati batas ideal, angka tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik nasional masih terbatas dan belum terwujud secara substantif (Komisi Pemilihan Umum, 2019).

Memasuki periode 2019–2024 menuju 2024–2029, keterwakilan perempuan di parlemen menunjukkan peningkatan positif. Berdasarkan hasil Pemilu 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kini memiliki 127 anggota perempuan dari total 580 kursi, atau sekitar 21,9%, yang merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah pemilihan legislatif di Indonesia berdasarkan data dari ANTARA News (2024). Sementara itu, di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dari 152 anggota terpilih, terdapat 55 perempuan atau sekitar 36,2%, melampaui ambang minimal 30% dan mencerminkan tren peningkatan representasi politik perempuan yang berkelanjutan.

Tabel 2 Perolehan Suara DPR RI & DPD RI Tahun 2014 – 2024

Lembaga	2014	2019	2024
DPR RI	97 kursi (17,32 %)	112 kursi (19,48 %)	127 kursi (21,9 %)
DPD RI	34 kursi (26,56 %)	40 kursi (29,41 %)	55 kursi (36,2 %)

Sumber: KPU RI, 2019 & Kompas.id 2024.

Sebagai salah satu partai politik dengan basis dukungan yang luas di tingkat nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menunjukkan komitmen terhadap peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia politik. Basis dukungan tersebut dapat dilihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Oktober 2023 yang mencatat elektabilitas Gerindra sebesar 14,5%, menempatkannya di posisi kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 25,2% (Kompas id, 2023) Selain itu, survei Data Riset Analitika pada Januari (2024) yang dikutip dari Antara News (2025) menunjukkan bahwa elektabilitas Gerindra mencapai 20,6%, menjadikannya partai dengan dukungan tertinggi secara nasional pada periode tersebut. Data ini memperlihatkan bahwa Gerindra memiliki pengaruh politik yang signifikan dan jangkauan konstituen yang luas di berbagai wilayah Indonesia.

Komitmen Partai Gerindra terhadap peningkatan peran perempuan dalam politik ditegaskan melalui berbagai kebijakan internal dan kegiatan organisasi. Menurut Partai Gerindra (2023) dalam situs resminya, partai ini memandang penting peran perempuan sebagai bagian dari kekuatan bangsa yang harus didorong untuk aktif dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah pembentukan organisasi sayap perempuan bernama Perempuan Indonesia Raya (PIRA). Organisasi ini berfungsi sebagai wadah kaderisasi, pendidikan politik, serta pemberdayaan bagi kader perempuan di lingkungan Partai Gerindra. Melalui PIRA, partai berupaya menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi perempuan untuk berperan aktif dalam dunia politik, termasuk dalam pengembangan kepemimpinan, pelatihan advokasi, dan peningkatan kapasitas bagi calon anggota legislatif perempuan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Partai Gerindra (2023), PIRA dibentuk untuk mendorong peningkatan kualitas dan partisipasi perempuan dalam bidang politik melalui program yang terarah dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan PIRA menjadi wujud nyata dari komitmen Partai Gerindra dalam mendukung kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sekaligus

memperkuat posisi perempuan dalam sistem politik nasional.

Di wilayah Provinsi Lampung, PIRA Gerindra Lampung menjadi salah satu unsur penting dalam mempersiapkan kader-kader perempuan yang akan bersaing dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, sosialisasi kebijakan dan aturan pemilu, pendampingan dalam proses pemenangan, hingga penguatan jejaring politik di kalangan perempuan, PIRA aktif berupaya mendorong partisipasi perempuan di berbagai tingkatan legislatif. Menariknya, langkah ini bukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan administratif terkait kewajiban 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon, tetapi juga bertujuan menghasilkan kader perempuan yang memiliki kapasitas, kualitas, dan daya saing di kancah politik daerah.

Menurut Anne Philips (Darmastuti 2017:16) hanya orang-orang yang memiliki kesamaan pandangan dengan kitalah yang benar-benar dapat kita percayai untuk mewakili kepentingan kita, bukan orang yang lebih berkompeten atau berkualitas. Jika harus memilih antara kompetensi dan kualitas dengan kesamaan pandangan, maka kesamaan pandanganlah yang lebih penting untuk perwakilan politik perempuan. Karena itu perlu ada perempuan yang mewakili kepentingan perempuan karena perempuanlah yang memiliki kesamaan pandangan dan kepentingan perempuan lainnya.

Atas dasar hal tersebut, menjadi penting untuk dilakukan penelitian yang secara khusus mengkaji strategi yang dijalankan oleh PIRA Gerindra Lampung dalam upaya meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan pada Pileg 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pola kerja politik, strategi elektoral yang diterapkan, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses memperjuangkan representasi perempuan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi sekaligus model bagi organisasi perempuan di partai politik lain dalam merancang strategi serupa untuk mendorong partisipasi dan representasi perempuan di lembaga legislatif, khususnya di wilayah Provinsi Lampung.

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis memanfaatkan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan erat dengan topik yang diangkat. Berbagai temuan dari studi sebelumnya dijadikan bahan pembanding untuk menelaah kelebihan dan kelemahannya, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan teori-teori pendukung guna memperkuat analisis dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu pertama yang menjadi rujukan adalah karya Lestari dan Hertanto (2024) Kajian ini mengungkap rendahnya partisipasi perempuan dalam kontestasi politik lokal akibat masih kuatnya dominasi laki-laki dalam ranah politik, pengaruh budaya patriarki, serta keterbatasan akses informasi bagi perempuan. Penelitian ini relevan dijadikan rujukan karena secara lokasi dan isu, memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian ini yang sama-sama membahas dinamika politik perempuan di Provinsi Lampung. Temuan tersebut memperjelas tantangan struktural dan sosial yang juga dihadapi oleh organisasi sayap perempuan seperti PIRA Gerindra Lampung, sehingga penting digunakan sebagai landasan awal dalam memahami konteks permasalahan yang tengah dikaji.

Selanjutnya, Aula (2023) melalui penelitiannya ia menyoroti persoalan ketimpangan gender dalam dunia politik nasional yang masih dibayangi budaya patriarki. Dalam kajian kepustakaan ini, ia menyimpulkan bahwa hambatan perempuan dalam berpolitik tidak hanya terjadi di daerah, tetapi merupakan problem nasional yang berakar kuat dalam sistem politik Indonesia. Penelitian ini penting dijadikan acuan karena memberikan gambaran teoritis yang dapat memperkuat kerangka berpikir dalam penelitian ini, sekaligus menjadi pembanding untuk melihat apakah permasalahan yang terjadi di Lampung bagian dari permasalahan politik perempuan secara nasional.

Penelitian ketiga yang dijadikan referensi adalah hasil kajian Fernandez, dkk. (2021) Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menegaskan bahwa proses kaderisasi, pelatihan politik, dan afirmasi gender di tubuh partai merupakan langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Penelitian ini dijadikan bahan pembanding karena membahas strategi internal partai di daerah

lain, yang memungkinkan untuk melihat perbedaan pola dan efektivitas strategi yang diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi rujukan penting untuk mengukur sejauh mana strategi PIRA Gerindra Lampung telah berjalan optimal dalam menciptakan kader perempuan yang mampu bersaing di legislatif. Berikutnya, Hurriyah dan Wildianti (2020) menemukan bahwa di banyak partai politik, keberadaan organisasi sayap perempuan hanya bersifat simbolis tanpa memiliki peran strategis yang signifikan dalam proses politik partai. Hasil penelitian ini sangat relevan karena PIRA Gerindra Lampung merupakan organisasi sayap perempuan partai. Temuan tersebut akan digunakan sebagai pembanding untuk menilai sejauh mana posisi PIRA dalam struktur partai, apakah hanya berfungsi secara administratif atau benar-benar memiliki peran substantif dalam menentukan strategi politik dan pencalonan kader perempuan.

Terakhir, penelitian dari Ummah, dkk. (2023) menjadi referensi penting sebagai pembanding antar daerah. Dalam studi kasus ini, ia menunjukkan bahwa pelatihan politik, kaderisasi perempuan, dan strategi afirmasi gender menjadi faktor penting dalam peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen daerah. Penelitian ini dijadikan pembanding karena membahas strategi serupa di wilayah yang berbeda. Hal ini memungkinkan penelitian ini untuk mengidentifikasi perbedaan pendekatan yang diterapkan PIRA Gerindra Lampung, sekaligus mengevaluasi keefektifan strategi tersebut jika dibandingkan dengan daerah lain.

Perbedaan penelitian ini dengan kelima penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, fokus kajian, metode, serta kontribusi yang ingin dicapai. Penelitian Lestari & Hertanto (2024) lebih menyoroti rendahnya partisipasi politik perempuan di Lampung, sementara penelitian ini secara khusus mengkaji strategi internal Partai Gerindra melalui PIRA Lampung dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pileg 2024. Selanjutnya, penelitian Aula (2023) menekankan isu ketimpangan gender secara nasional, sedangkan penelitian ini lebih spesifik menelaah upaya konkret yang dilakukan partai politik di tingkat daerah. Penelitian Fernandez dkk. (2021) dan Ummah dkk. (2023) mengulas strategi partai di Magetan dan Bali, sehingga ruang lingkupnya berbeda dengan penelitian ini yang berfokus

pada konteks lokal Lampung dengan karakteristik politik dan sosial yang khas. Di sisi lain, penelitian Hurriyah dan Wildianti (2020) menyoroti relasi simbolis organisasi sayap perempuan dengan partai politik secara umum, sedangkan penelitian ini membedah peran substantif PIRA dalam menentukan strategi dan kaderisasi perempuan di tubuh Gerindra Lampung. Dari sisi metode, sebagian penelitian terdahulu banyak menggunakan pendekatan deskriptif atau studi kepustakaan, sementara penelitian ini mengandalkan pendekatan kualitatif dengan wawancara, dokumentasi, dan analisis konten agar mampu menggali strategi nyata dan mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keunikan karena menggabungkan konteks lokal, fokus pada strategi praktis, serta metode kualitatif yang lebih aplikatif dibandingkan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan berbagai temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya, persoalan keterwakilan perempuan dalam politik masih didominasi oleh isu rendahnya partisipasi dan kuatnya hambatan sosial-budaya yang menghambat akses perempuan ke ruang-ruang politik formal. Sebagian besar studi tersebut lebih banyak menyoroti faktor-faktor eksternal seperti budaya patriarki, minimnya pendidikan politik perempuan, hingga lemahnya peran partai dalam mendorong keterlibatan kader perempuannya. Padahal, aspek strategi internal partai, khususnya melalui peran organisasi sayap perempuan, belum banyak mendapat perhatian serius dalam kajian akademik, terutama di wilayah Provinsi Lampung. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini berusaha menghadirkan perspektif baru dengan menelusuri secara khusus bagaimana strategi yang diterapkan Partai Gerindra melalui PIRA Gerindra Lampung dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilihan Legislatif 2024. Penelitian ini tidak hanya bertujuan menggambarkan pola kerja organisasi perempuan partai, tetapi juga menganalisis sejauh mana efektivitas strategi yang dijalankan, kendala yang dihadapi, serta potensi yang dapat dimanfaatkan ke depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskusi ilmiah tentang kontribusi organisasi sayap perempuan partai politik dalam upaya memperluas representasi perempuan di parlemen daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi yang dijalankan oleh Partai Gerindra melalui sayap partai PIRA Gerindra Lampung dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilihan Legislatif Provinsi Lampung 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh Partai Gerindra melalui organisasi sayap perempuan PIRA dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Lampung pada Pemilu 2024. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, menggali peluang ke depan, serta memberikan rekomendasi dan evaluasi strategi yang lebih efektif dan responsif gender bagi peningkatan partisipasi politik perempuan di tingkat daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan dan politik, khususnya yang berkaitan dengan isu keterwakilan politik perempuan di parlemen daerah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang membahas strategi partai politik atau organisasi sayap perempuan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di tingkat lokal.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Partai Gerindra, khususnya PIRA Lampung, dalam menilai efektivitas strategi yang telah dijalankan. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi strategis untuk perbaikan pola kaderisasi, sistem pencalonan legislatif perempuan, serta strategi pemenangan politik yang lebih responsif terhadap isu gender di masa mendatang.

c. Manfaat Akademis

Dari sisi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan diskursus keilmuan di bidang ilmu pemerintahan, politik, dan gender. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti lain yang tertarik mengkaji isu keterwakilan perempuan dan strategi politik partai di tingkat

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Strategi

Secara etimologis, istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos*, yang merupakan gabungan dari dua kata, yakni *stratos* yang berarti pasukan atau tentara dan *ego* yang berarti pemimpin, Kusmanto (2013). Dari pengertian dasarnya tersebut, istilah strategi berkembang menjadi sebuah konsep yang lebih luas, yaitu sebagai suatu perencanaan terarah yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan berbagai potensi, peluang, serta kendala yang ada di lingkungan internal maupun eksternal. Secara umum, strategi dapat dipahami sebagai cara atau metode yang dirancang secara sistematis untuk memastikan tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Salusu (2006) menjelaskan bahwa strategi adalah seni dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi secara optimal, melalui hubungan dan komunikasi yang efektif dengan lingkungan sekitarnya, demi memperoleh hasil atau keuntungan yang diharapkan. Senada dengan itu, David (Hasan, 2021) menyatakan bahwa strategi merupakan sarana bagi organisasi untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam jangka waktu panjang, di mana dalam prosesnya diperlukan langkah-langkah sistematis dan terencana, tidak hanya sebatas perencanaan.

Marrus dan Umar (2013) memaknai strategi sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan tertinggi organisasi untuk memastikan tujuan lembaga dapat tercapai secara maksimal. Pandangan serupa dikemukakan Marrus (2002), bahwa strategi berfungsi sebagai pedoman utama yang dirancang oleh manajemen senior dalam merancang rencana jangka panjang

organisasi, sekaligus menguraikan metode, langkah-langkah, dan kebijakan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut. Strategi juga dipahami sebagai alat untuk menyatukan visi, misi, tujuan, kebijakan, hingga prosedur organisasi ke dalam satu sistem yang saling terkait dan dapat diterapkan secara berkelanjutan. Salusu (2006) menambahkan bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental*, yaitu terus berkembang, bertahap, serta berkesinambungan sesuai perkembangan situasi dan kondisi di masa depan. Strategi juga harus mampu merespons perubahan lingkungan yang dinamis, dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan *internal*, sekaligus peluang serta ancaman eksternal organisasi.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan pedoman mendasar yang berisi arah, sasaran, kebijakan, dan langkah-langkah taktis yang disusun sesuai dengan situasi serta kondisi yang dihadapi organisasi. Strategi bertujuan memanfaatkan potensi yang dimiliki semaksimal mungkin, sekaligus mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.

Dalam perancangannya, strategi memerlukan tata kelola yang baik agar dapat dijalankan secara efektif. Manajemen strategi didefinisikan sebagai seni sekaligus ilmu dalam merumuskan, menerapkan, serta mengevaluasi berbagai keputusan lintas bidang dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk mencapai targetnya, David (2011). Manajemen strategi merupakan proses yang tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, melainkan juga mencakup penerapan strategi serta evaluasi berkala atas keberhasilannya. Tujuan utama manajemen strategi ialah menciptakan peluang baru di masa depan, sembari mengoptimalkan potensi yang telah dimiliki saat ini.

Secara umum, manajemen strategi terdiri dari tiga tahapan pokok, yakni pertama, perumusan strategi yang melibatkan proses analisis situasi, penetapan visi, misi, serta perumusan tujuan jangka panjang organisasi. Kedua, pelaksanaan atau implementasi strategi yang berkaitan dengan penerapan berbagai rencana,

kebijakan, dan tindakan di lapangan. Ketiga, tahap evaluasi yang berfungsi untuk menilai efektivitas pelaksanaan strategi serta melakukan perbaikan apabila diperlukan. Dalam praktiknya, terdapat tingkatan strategi yang dikenal sebagai *master strategy*. Konsep ini dijelaskan oleh Schendel, Hofer, dan Higgins (1985) (dalam Hasan 2021), yang membagi strategi ke dalam beberapa level, yaitu:

a. *Enterprise Strategy*

Strategi jenis ini berhubungan dengan bagaimana organisasi merespons dinamika sosial di masyarakat. Dalam kehidupan sosial, terdapat berbagai kelompok kepentingan, seperti kelompok politik, kelompok penekan, dan masyarakat umum. *Enterprise strategy* bertujuan menyesuaikan arah organisasi dengan tuntutan masyarakat luas, sehingga organisasi dapat memperoleh keuntungan sosial dan politik melalui interaksi yang efektif dengan berbagai pihak eksternal.

b. *Corporate Strategy*

Corporate strategy berkaitan dengan perumusan misi organisasi yang melibatkan berbagai bidang kegiatan dalam suatu organisasi. Strategi ini berperan dalam menentukan arah kebijakan umum, pengembangan aktivitas organisasi, dan pengelolaan berbagai sektor agar sejalan dengan tujuan utama yang telah ditetapkan.

c. *Business Strategy*

Jenis strategi ini berhubungan dengan cara organisasi memposisikan dirinya di lingkungan masyarakat. Strategi ini bertujuan membangun citra dan dukungan dari masyarakat luas, donatur, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan strategi ini, organisasi berupaya memperluas jejaring sosial dan politik demi kepentingan pengembangan kelembagaan.

d. *Functional Strategy*

Functional strategy berkaitan dengan pelaksanaan teknis dan operasional yang menunjang keberhasilan organisasi. Strategi ini dibagi ke dalam beberapa

fungsi utama, seperti manajemen keuangan, sumber daya manusia, isu-isu strategis, dan kegiatan ekonomi organisasi. *Functional strategy* menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional mendukung tercapainya visi dan misi organisasi.

Dalam penelitian ini, *functional strategy* menjadi relevan karena menggambarkan bagaimana upaya peningkatan keterwakilan perempuan tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi juga diwujudkan melalui kegiatan operasional yang nyata. Hal ini dapat dilihat melalui pengelolaan sumber daya manusia seperti rekrutmen serta pelatihan kader perempuan, dukungan keuangan untuk pelaksanaan program pemberdayaan dan kegiatan kampanye calon legislatif perempuan, penguatan isu kesetaraan gender dalam program kerja organisasi, serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing kader perempuan. Dengan demikian, *functional strategy* menunjukkan bagaimana PIRA Gerindra Lampung mengimplementasikan strategi organisasi ke dalam aktivitas teknis yang terarah guna mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam Pemilihan Legislatif 2024.

1. Politik Baru Kesetaraan Gender

Squires (2007) menjelaskan bahwa strategi kesetaraan gender merupakan pendekatan politik dan institusional yang berupaya untuk mengubah struktur kekuasaan dan pola representasi agar perempuan memperoleh akses, partisipasi, dan pengaruh yang setara dalam proses pengambilan keputusan publik. Squires menegaskan bahwa konsep kesetaraan gender tidak hanya menyangkut persoalan kuantitas perempuan dalam politik, melainkan juga kualitas representasi yang dihasilkan melalui kebijakan, lembaga, dan norma sosial yang mendukung partisipasi setara. Dalam pandangannya, politik kesetaraan telah bergeser dari paradigma lama yang berfokus pada *redistribution* (pemerataan sumber daya ekonomi) menuju paradigma baru yang menekankan *recognition* (pengakuan identitas) dan *representation* (perwakilan dalam ruang politik dan sosial).

Perubahan ini terjadi seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap pengakuan identitas kelompok yang termarginalkan, seperti perempuan, etnis minoritas, dan kelompok disabilitas. Oleh karena itu, kesetaraan gender tidak lagi hanya dipahami sebagai upaya memberikan kesempatan yang sama, tetapi juga menciptakan kondisi sosial dan kelembagaan yang memastikan perempuan dapat berpartisipasi secara substantif. Squires mengemukakan tiga bentuk strategi utama dalam mencapai kesetaraan gender, yaitu strategi inklusi (*inclusion strategy*), strategi pembalikan (*reversal strategy*), dan strategi pengarusutamaan gender (*mainstreaming strategy*).

Strategi inklusi menekankan pentingnya memperluas akses perempuan dalam politik melalui kebijakan afirmatif seperti kuota, pelatihan politik, dan pembukaan ruang partisipasi yang lebih besar di partai maupun lembaga negara. Strategi pembalikan lebih menekankan pada penguatan kelembagaan perempuan dengan membentuk unit atau organisasi khusus di dalam struktur politik yang berfungsi sebagai saluran advokasi dan representasi perempuan. Sementara strategi pengarusutamaan gender merupakan tahap lanjutan yang menempatkan perspektif gender ke dalam seluruh proses perumusan dan implementasi kebijakan publik, sehingga kesetaraan tidak menjadi program tambahan, tetapi menjadi nilai dasar dalam sistem politik dan pemerintahan.

Melalui tiga pendekatan tersebut, Squires (2007) menegaskan bahwa kesetaraan gender harus dipahami secara multidimensional yang melibatkan aspek redistribusi, representasi, dan rekognisi yang diintegrasikan dalam kebijakan politik. Dengan demikian, strategi kesetaraan gender tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah perempuan di ruang publik, tetapi juga memastikan bahwa keberadaan mereka berpengaruh secara substantif terhadap arah kebijakan dan nilai demokrasi yang lebih inklusif.

Tabel 3 Strategi Kesetaraan Gender Menurut Squires (2007)

Dimensi Strategi	Fokus Utama	Indikator
Strategi Inklusi (<i>Inclusion Strategy</i>)	Meningkatkan partisipasi dan kehadiran perempuan dalam lembaga politik	Penerapan kebijakan kuota 30% calon legislatif perempuan melalui rekrutmen Program pelatihan dan kaderisasi politik bagi perempuan. Dukungan Partai terhadap Pencalonan Perempuan
Strategi Pembalikan (<i>Reversal Strategy</i>)	Membangun lembaga dan mekanisme khusus yang berorientasi pada Pemberdayaan perempuan	Pembentukan wadah atau organisasi sayap perempuan di partai (misalnya PIRA Gerindra) Sebagai ruang advokasi perempuan di lembaga politik. Kegiatan penguatan kapasitas dan jaringan perempuan di politik.
Strategi Pengarusutamaan Gender (<i>Mainstreaming Strategy</i>)	Mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh kebijakan, program, dan struktur kelembagaan.	Penerapan analisis gender dalam setiap kebijakan publik dan partai. Adanya evaluasi dampak kebijakan & Strategi terhadap kesetaraan gender.

Sumber : Squires (2007)

2. Gender & Partai Politik

Lovenduski (2008) membahas secara mendalam bagaimana partai politik berfungsi sebagai aktor kunci dalam menentukan pola keterwakilan perempuan dalam sistem demokrasi perwakilan ia menjelaskan bahwa partai bukan sekadar wadah kompetisi politik, melainkan institusi yang memiliki kewenangan besar dalam proses rekrutmen, seleksi, dan promosi kandidat, sehingga secara langsung memengaruhi peluang perempuan untuk menduduki jabatan publik. Lovenduski (2008) menekankan bahwa budaya organisasi partai, jaringan informal, serta standar kepemimpinan yang berkembang secara historis seringkali berakar pada norma maskulin, sehingga menciptakan hambatan struktural bagi perempuan. Argumentasi ini sejalan dengan artikel Lovenduski sebelumnya tentang refleksi feminis terhadap demokrasi perwakilan, yang menyatakan bahwa institusi demokrasi modern dibangun dalam konteks sejarah ketika perempuan belum diakui sebagai subjek politik penuh. Karena itu, aturan dan praktik yang berkembang di dalamnya sejak awal lebih mencerminkan pengalaman serta kepentingan laki-laki.

Dalam artikelnya, Lovenduski (2008) juga menjelaskan bahwa meskipun perempuan telah memperoleh hak politik formal, sistem yang ada belum sepenuhnya bertransformasi untuk mengakomodasi kesetaraan secara substantif. Kenaikan jumlah perempuan di parlemen berlangsung lambat, dan kualitas demokrasi suatu negara tidak selalu sejalan dengan tingkat representasi perempuan. Argumen dalam buku tersebut memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bagaimana kebijakan seperti kuota kandidat atau reformasi internal partai memang dapat meningkatkan keterwakilan perempuan, tetapi sering menghadapi resistensi dan tidak otomatis mengubah struktur kekuasaan yang sudah mapan. Dengan demikian, baik buku maupun artikel Lovenduski (2008) sama-sama menegaskan bahwa persoalan utama bukan hanya tentang kehadiran perempuan dalam angka, melainkan tentang bagaimana institusi politik terutama partai dirancang dan dijalankan. Keduanya menunjukkan bahwa tanpa perubahan mendasar pada budaya dan mekanisme internal partai, demokrasi perwakilan akan terus mereproduksi ketimpangan gender meskipun

secara formal telah membuka ruang partisipasi bagi perempuan.

Tabel 4 Strategi Kesetaraan Gender Menurut Para Ahli

Buku	Perbedaan
<i>Gender and Party Politics</i> Lovenduski dan Norris (2008)	Buku ini berfokus pada peran partai politik sebagai aktor utama dalam menentukan keterwakilan perempuan dalam demokrasi perwakilan. Lovenduski menjelaskan bagaimana partai bertindak sebagai “penjaga gerbang” (<i>gatekeeper</i>) melalui mekanisme rekrutmen, seleksi kandidat, dan budaya organisasi yang sering kali bias gender. Analisisnya bersifat institusional dan operasional, menekankan hambatan konkret yang dihadapi perempuan dalam struktur partai serta strategi reformasi seperti kuota dan perubahan prosedur internal.
<i>The New Politics of Gender Equality</i> Squires (2007)	Buku ini menganalisis politik kesetaraan gender pada tingkat yang lebih luas, yakni bagaimana institusi negara, kebijakan publik, dan kerangka demokrasi modern membentuk serta mereproduksi ketidaksetaraan gender. Squires tidak hanya membahas representasi, tetapi juga bagaimana konsep kesetaraan dilakukan dalam kebijakan, praktik administrasi, dan strategi gender <i>mainstreaming</i> (Inklusi, Pembalikan, dan pengarusutamaan gender). Pendekatannya lebih struktural dan teoritis, menyoroti bagaimana aturan formal dan informal dalam sistem politik secara keseluruhan memengaruhi posisi perempuan.

Persamaan Keduanya Kedua buku sama-sama berangkat dari perspektif feminis dan menolak anggapan bahwa demokrasi bersifat netral gender. Keduanya menekankan bahwa ketidaksetaraan perempuan bukan semata-mata persoalan kapasitas individu, melainkan hasil dari struktur dan aturan institusional yang telah lama dibentuk dalam konteks dominasi maskulin. Baik Lovenduski maupun Squires sepakat bahwa perubahan menuju kesetaraan memerlukan reformasi institusional, bukan hanya peningkatan jumlah perempuan dalam politik.

Sumber: Lovenduski (2008) & Squires (2007)

Dalam penelitian ini, teori Squires (2007) lebih tepat dijadikan kerangka utama karena menawarkan analisis yang bersifat struktural dan komprehensif terhadap bagaimana kesetaraan gender diproduksi, dinegosiasikan, dan diinstitutionalisasi dalam sistem politik modern. Jika Lovenduski (2008) memberikan penjelasan operasional mengenai peran partai sebagai penjaga gerbang representasi, maka Squires (2007) memungkinkan analisis yang lebih dalam mengenai bagaimana aturan formal, kebijakan publik, serta praktik administratif membentuk peluang dan batasan bagi perempuan dalam politik. Dengan menggunakan Squires sebagai pisau analisis utama, penelitian tidak hanya menjelaskan strategi atau mekanisme internal partai, tetapi juga mampu menempatkannya dalam konteks struktur kekuasaan dan desain kebijakan yang lebih luas. Pendekatan ini memperkuat kedalaman teoretis penelitian karena mampu menjelaskan akar institusional ketidaksetaraan, bukan sekadar gejala representasionalnya.

2.2 Tinjauan Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah bentuk partisipasi warga negara dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan publik, baik melalui saluran formal seperti pemilihan umum dan keanggotaan partai, maupun saluran non-formal

seperti advokasi, protes, dan kampanye publik, Fautanu (2020). Istilah ini berasal dari bahasa Latin *parti-cipare*, yang secara harfiah berarti ‘mengambil bagian’; menggambarkan keterlibatan aktif individu dalam komunitasnya untuk mendukung atau menolak kebijakan pemerintah. Budiarjo (1998) mendefinisikan partisipasi politik sebagai tindakan warga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memilih pemimpin, memengaruhi kebijakan publik, atau berperan aktif dalam organisasi politik dan masyarakat sipil.

McClosky (Budiarjo, 2009) menggaris bawahi bahwa partisipasi bukan sebatas sikap mental melainkan tindakan nyata seperti memilih, melobi, atau menyampaikan aspirasi kepada pejabat publik secara langsung. Sementara Nimmo dan Rosenau (Arifin, 2015) menekankan pentingnya komunikasi politik sebagai bentuk interaksi antarkonstituen dan antara warga dengan pemerintah mencakup diskusi, konsultasi, dan dialog publik.

Ada tiga dimensi utama partisipasi politik:

- a. Dimensi Kognitif, mencakup pemahaman dan pengetahuan warga terhadap sistem politik ;
- b. Dimensi Afektif, yaitu sikap, nilai, dan kepercayaan politik yang mendorong keterlibatan;
- c. Dimensi Perilaku, berupa Tindakan nyata seperti memilih, bergabung partai, atau menghadiri pertemuan publik . Al – Faris (2025)

Partisipasi politik digunakan sebagai indikator legitimasi demokrasi; semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin kuat pengakuan atas keterwakilan rakyat dalam pemerintahan Rasyid (2019) Namun demikian, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa faktor budaya politik, ekonomi, dan gender sering menjadi penghambat signifikan. Misalnya, akses terbatas terhadap pendidikan politik dan dominasi elit politik mengurangi efektivitas partisipasi warga dari kelompok marginal terutama perempuan dan kelompok ekonomi rendah. Secara ringkas, partisipasi politik bukan sekadar menghadiri pemilu ia juga mencakup ruang diskusi kebijakan, pengawasan pemerintah, dan penyampaian suara konstituen melalui pacuan politik dan sosial.

Keberadaan saluran formal dan informal yang aktif menunjukkan sejauh mana nilai-nilai demokrasi benar-benar hidup di tengah masyarakat.

2.2.1 Bentuk – Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik tidak hanya mencerminkan keterlibatan warga dalam proses politik formal seperti pemilihan umum, tetapi juga mencakup berbagai bentuk tindakan yang memengaruhi pengambilan kebijakan publik. Sebagaimana dijelaskan Kusmanto (2013), keaktifan warga dalam sistem politik melalui partisipasi dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur stabilitas politik, integritas pemerintahan, kualitas kehidupan politik, serta tingkat kepuasan atau kekecewaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Dalam kerangka ini, Gany (2001) mengklasifikasikan tindakan partisipatif ke dalam dua kategori utama: konvensional dan non-konvensional.

1. Partisipasi Konvensional

Partisipasi konvensional meliputi cara – cara yang lazim diterima dalam sistem demokrasi seperti

- a. Pemungutan suara (*voting*), sebagai bentuk partisipasi dasar masyarakat dalam memilih pemimpin dan wakilnya, menjadi fondasi legitimasi pemerintahan publik.
- b. Diskusi politik yang dilakukan di ruang publik atau media, memperkaya wacana demokrasi dan membantu mendiseminasikan pandangan kritis.
- c. Pelaksanaan kampanye, di mana warga ikut aktif menyebarkan visi dan misi calon legislatif atau kepala daerah.

2. Partisipasi Non – Konvensional

Partisipasi non - konvensional mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan di luar norma demokrasi formal, antara lain:

- a. Unjuk rasa dan mogok kerja, sering kali digunakan sebagai bentuk tekanan publik terhadap kebijakan tertentu.
- b. Perusakan aset, pembakaran, dan pemboman sebagai bentuk penolakan ekstrem
- c. Kekerasan terhadap individu, seperti penculikan atau pembunuhan politik,

meskipun berdampak destruktif, tetap menjadi bagian dari spektrum keterlibatan politik masyarakat yang ekstrem.

Lebih lanjut, Surbakti (2007) membedakan partisipasi politik menjadi dua tipe aktif, meliputi keterlibatan langsung dalam perumusan kebijakan dan kritik terhadap kekuasaan, serta pasif, yang lebih bersifat menerima keputusan tanpa sikap kritis atau interaksi. Rahman (2018) menambahkan kategori seperti partisipasi militan, yang ditandai oleh sikap radikal dan agresif, dan sangat pasif, di mana warga cenderung apatis terhadap lingkungan politik.

2.2.2 Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi politik perempuan telah diakui secara hukum melalui perangkat regulasi, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun secara realitas, keterkaitan antara perempuan dan dunia politik masih menghadapi hambatan signifikan Mukaron (2008). Di satu sisi, perempuan dituntut untuk aktif berperan dalam berbagai sektor demi pembangunan nasional, tetapi di sisi lain mereka sering dihadapkan pada norma yang menekankan kodrat perempuan sebagai pengabdian keluarga Hadis & Eddyono (2005). Situasi ini menciptakan dilema bagi perempuan yang berkarier di dunia politik merasa terpancang untuk mempersembahkan kemampuan dan semangatnya demi kemajuan bangsa, namun serangkaian opini publik masih menekankan peran mereka di ranah domestik.

Konsep peran ganda atau *dual-role* muncul karena ekspektasi agar perempuan menjadi mitra sejajar dalam pembangunan dan juga hadir sebagai wakil kelompok gender dalam pengambilan keputusan politik. Namun dalam praktiknya, peran tersebut belum berjalan efisien. Hingga kini, keterlibatan perempuan sebatas pada tahap pemilih atau peserta pemilu, sementara keikutsertaan mereka sebagai calon legislative yang seharusnya mencapai minimal 30% menurut UU 7/2017 Pasal 173 ayat (2)(e) belum terpenuhi secara optimal.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang juga digunakan oleh Bappenas dalam perencanaan pembangunan nasional (2023) mencatat jumlah penduduk perempuan

di Indonesia mencapai 131,9 juta jiwa, namun jumlah perempuan di DPR RI masih sangat rendah, yakni hanya 97 orang atau sekitar 17,3% dari total anggota parlemen. Angka ini jauh di bawah ambang hukum yang telah ditetapkan. UU tersebut juga mensyaratkan pengurus partai di tingkat pusat untuk mematuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, sebagai titik awal memperluas akses perempuan dalam perebutan mandat rakyat di parlemen.

2.3 Tinjauan Partai Politik

Secara historis, keberadaan partai politik memiliki hubungan yang sangat erat dengan proses modernisasi yang berlangsung di masyarakat Barat. Dalam perjalanan sejarahnya, partai-partai politik berkembang dalam berbagai bentuk, baik sebagai partai reformis, revolusioner, maupun nasionalis, dan memainkan peran strategis sebagai alat penggerak modernisasi, termasuk di negara-negara berkembang. Dalam konteks masyarakat kontemporer, partai politik tidak hanya menjadi wadah perjuangan ideologis, tetapi juga berfungsi sebagai kekuatan penting yang mendorong transformasi sosial dan politik. Jalur serta model modernisasi yang diikuti oleh suatu negara, pada banyak kasus, sangat dipengaruhi oleh karakter dan arah gerak partai-partai politik yang mendominasi ruang politiknya After (1987).

Partai politik dapat dipahami sebagai organisasi yang terdiri dari sekelompok individu yang memiliki kesamaan pandangan ideologis dan tujuan politik. Tujuan utama mereka adalah memperoleh kekuasaan secara sah melalui pemilihan umum guna menjalankan program-program yang telah dirumuskan. Miriam Budiardjo (1988) menyatakan bahwa partai politik merupakan wadah organisasi politik yang anggotanya memiliki nilai, orientasi, dan cita-cita yang relatif sama, serta bertujuan merebut dan mempertahankan kekuasaan melalui jalur konstitusional demi melaksanakan agenda politik mereka. Dalam konteks ini, partai politik bukan hanya alat elektoral, tetapi juga instrumen penting dalam proses demokratisasi, termasuk dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan representatif.

Sejalan dengan itu, Amal (Kadir, 2014) menekankan bahwa partai politik merupakan komponen yang niscaya dalam tatanan politik modern yang demokratis. Tanpa kehadiran partai politik, proses representasi politik dan artikulasi aspirasi rakyat akan kehilangan salurannya. Partai politik menjalankan fungsi-fungsi vital dalam kehidupan demokrasi, antara lain sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat, rekrutmen kepemimpinan politik, pembentukan opini publik, serta media komunikasi antara masyarakat dan pengambil kebijakan. Keberadaan partai politik juga memungkinkan berlangsungnya proses checks and balances terhadap kekuasaan negara.

2.3.1 Fungsi Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu institusi paling penting dalam sistem demokrasi modern, karena ia berfungsi sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan negara dalam pengambilan keputusan politik. Keberadaan partai memungkinkan aspirasi, kepentingan, dan kehendak rakyat dikristalisasi menjadi kebijakan melalui mekanisme representasi politik yang sah secara konstitusional. Dalam definisinya yang klasik, partai politik dipahami sebagai suatu organisasi yang secara sadar dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan dan ideologi yang relatif sama, untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik dengan cara-cara yang demokratis guna mewujudkan agenda kebijakan tertentu Budiardjo (2006). Melalui fungsi ini, partai tidak hanya bertujuan menguasai pemerintahan, tetapi juga bertanggung jawab dalam menyuarakan kepentingan publik, merumuskan aspirasi berbagai kelompok masyarakat, serta menjadi sarana kompetisi kekuasaan yang damai dan terlembaga.

Budiardjo (2006) menyebutkan bahwa secara umum partai politik menjalankan empat fungsi utama. Pertama, sebagai sarana komunikasi politik, yaitu menyalurkan beragam aspirasi dan pandangan masyarakat secara terstruktur. Kedua, sebagai media sosialisasi politik, yakni melalui proses di mana individu memperoleh pemahaman, sikap, dan nilai-nilai politik yang berlaku dalam masyarakat melalui ceramah, kursus, dan pendidikan politik lainnya. Ketiga, partai politik berperan dalam rekrutmen politik, yaitu mengidentifikasi dan mengajak

individu berbakat untuk bergabung dalam kegiatan politik, sekaligus memperluas partisipasi masyarakat. Keempat, partai politik juga bertugas mengatur dan menyelesaikan konflik secara damai dalam masyarakat yang plural, melalui mekanisme demokratis yang sah Budiardjo (Asshiddiqie, 2011). Keempat fungsi tersebut kemudian dikodifikasi lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam Pasal 12 undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa salah satu hak yang dimiliki partai politik adalah membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik, yang bertujuan memperkuat struktur internal serta memperluas jangkauan partai dalam masyarakat.

2.3.2. Peran Partai Politik

Dalam praktiknya, partai politik berperan sebagai media artikulasi dan agregasi kepentingan, yakni menyampaikan berbagai tuntutan dan harapan masyarakat kepada negara, sekaligus meramu beragam kepentingan tersebut ke dalam bentuk kebijakan publik yang realistis dan dapat diterapkan. Fungsi ini menjadikan partai sebagai salah satu kanal utama komunikasi politik, baik dari bawah ke atas (*bottom-up*) maupun dari atas ke bawah (*top-down*). Artinya, partai berperan menyampaikan suara rakyat kepada penguasa, sekaligus menyosialisasikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat agar tercipta pemahaman dan dukungan bersama Surbakti (1992). diperkenalkan pada nilai-nilai politik, prinsip-prinsip demokrasi, dan tata kelola kekuasaan yang sah. Partai menjadi wadah penanaman ideologi dan pembentukan orientasi politik individu agar mereka mampu berpartisipasi secara sadar dan aktif dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, partai juga memiliki fungsi integratif, yakni membantu menyatukan keragaman sosial, budaya, dan etnis masyarakat ke dalam satu identitas politik nasional yang utuh, Budiardjo (2006).

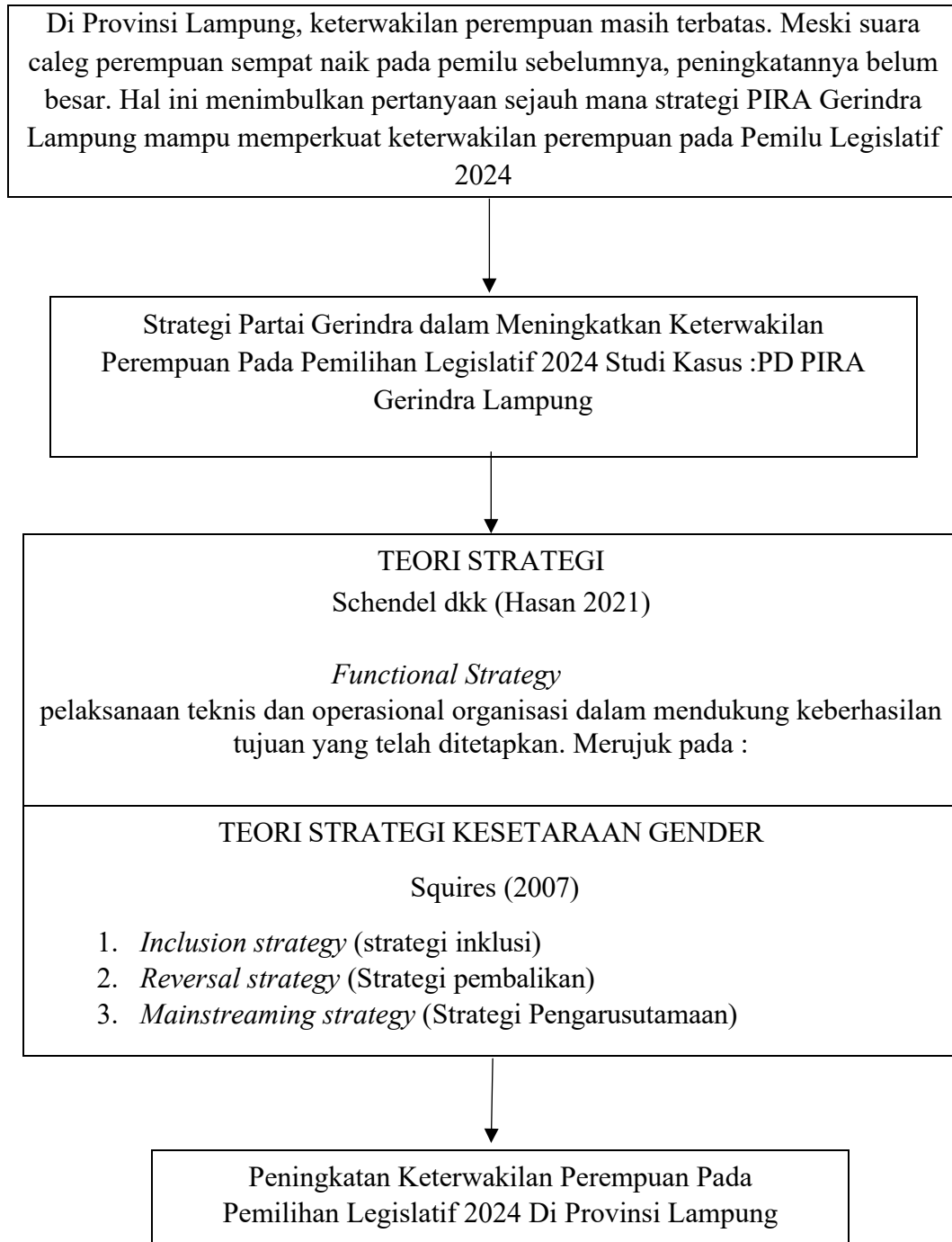
2.4 Kerangka Pikir

Dalam rangka meningkatkan perolehan kursi atau suara, setiap partai politik memiliki cara dan strategi tersendiri. Pada konteks Pemilihan Legislatif 2024, strategi partai melalui peran sayap partai perempuannya menjadi salah satu elemen penting dalam upaya memperkuat keterwakilan perempuan. Partai Gerindra

merupakan salah satu contoh partai yang menunjukkan pengaruh signifikan dari peran organisasi sayap perempuannya, yaitu PIRA (Perempuan Indonesia Raya). Berbagai langkah telah ditempuh partai dalam memperluas partisipasi perempuan di ranah politik, terutama dalam proses pencalonan legislatif. Setiap strategi disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial-politik daerah, potensi kader perempuan, serta hambatan struktural dan budaya patriarki yang masih kuat dalam dunia politik.

Analisis strategi Partai Gerindra melalui PIRA pada penelitian ini menggunakan Teori Strategi Kesetaraan Gender yang dikemukakan oleh Squires (2007). Squires menjelaskan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender dapat dilakukan melalui tiga bentuk strategi utama, yaitu strategi inklusi (*inclusion strategy*), strategi pembalikan (*reversal strategy*), dan strategi pengarusutamaan gender (*mainstreaming strategy*). *Functional strategy* menurut Schendel dkk (Hasan 2021) juga menjadi teori strategi yang relevan karena menggambarkan bagaimana upaya peningkatan keterwakilan perempuan tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi juga diwujudkan melalui kegiatan operasional yang nyata. Hal ini dapat dilihat melalui pengelolaan sumber daya manusia seperti rekrutmen serta pelatihan kader perempuan, dukungan keuangan untuk pelaksanaan program pemberdayaan dan kegiatan kampanye calon legislatif perempuan, penguatan isu kesetaraan gender dalam program kerja organisasi, serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing kader perempuan. Strategi inklusi menekankan peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga politik melalui kebijakan afirmatif seperti kuota keterwakilan perempuan melalui rekrutmen. Strategi pembalikan berfokus pada pembentukan lembaga perempuan dalam partai, seperti PIRA Gerindra, yang berfungsi memperjuangkan kepentingan perempuan, melakukan kaderisasi, serta memperkuat kapasitas politik perempuan. Sementara itu, strategi pengarusutamaan gender mengarahkan partai untuk mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender ke dalam seluruh kebijakan, struktur, dan proses pengambilan keputusan, agar partisipasi perempuan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif.

Penelitian ini menelaah bagaimana Partai Gerindra, khususnya melalui PIRA Gerindra Lampung, merancang dan melaksanakan strategi-strategi tersebut untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk implementasi strategi politik, efektivitas dukungan kelembagaan terhadap perempuan, serta peran organisasi sayap partai dalam mendorong keterlibatan perempuan secara lebih luas di bidang politik elektoral.



Gambar 1 Kerangka Pikir

Sumber:Diolah Peneliti 2026

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Sugiyono (2018) terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan dalam penelitian yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan tertentu, maksudnya adalah Penelitian ilmiah yang dilakukan secara rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti berdasarkan logika dan teori yang masuk akal, empiris berarti dapat diamati dan dibuktikan secara inderawi, sedangkan sistematis menunjukkan adanya langkah-langkah terstruktur yang logis. Data yang diperoleh harus *valid* (sesuai kenyataan), *reliabel* (dapat dipercaya), dan objektif (tidak dipengaruhi pendapat pribadi). Dalam pendekatan kualitatif, keabsahan data dijaga melalui triangulasi dan uji kredibilitas, sedangkan dalam penelitian kombinasi dilakukan dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian memiliki tujuan untuk menggambarkan, membuktikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan sesuatu. Secara umum, hasil penelitian berguna untuk memahami, memecahkan, dan mencegah masalah, serta memperbaiki keadaan menuju kondisi yang lebih baik Sugiyono (2018). Penelitian Strategi Partai Gerindra dalam meningkatkan keterwakilan Perempuan pada pemilihan legislatif 2024 studi kasus: PIRA Gerindra Lampung menggunakan metode penelitian Kualitatif.

Penelitian Kualitatif merupakan metode penelitian yang saat ini dinamakan sebagai metode baru karena baru dikenal luas dalam dunia akademik. Selain itu, metode ini juga dijuluki sebagai pendekatan artistik karena proses penelitiannya lebih fleksibel dan tidak terlalu kaku dalam pola. Metode ini juga bersifat interpretatif karena peneliti berfokus pada penafsiran makna dari data yang diperoleh di lapangan.

Penelitian kualitatif melihat objek kajian sebagai sesuatu yang bersifat dinamis, merupakan hasil dari konstruksi pemikiran serta penafsiran terhadap fenomena yang diamati. Pendekatan ini juga memandang objek secara menyeluruh (holistik), karena setiap bagiannya saling terhubung dan membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, Sugiyono (2018).

Alasan peneliti memilih penelitian kualitatif dalam penelitian ini karena dinilai paling tepat untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam strategi yang dijalankan Partai Gerindra, khususnya melalui organisasi sayap perempuan PIRA, dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji realitas sosial-politik secara holistik dan mendalam, dengan memerhatikan latar belakang, konteks, serta interaksi sosial yang melingkupi strategi partai.

Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2017), metode kualitatif memandang objek penelitian sebagai sesuatu yang dinamis dan merupakan hasil konstruksi pemikiran serta interpretasi terhadap gejala yang diamati. Metode ini juga bersifat interpretatif dan tidak terpola secara kaku, sehingga memungkinkan peneliti untuk menelusuri makna di balik praktik-praktik strategis yang dilakukan partai secara fleksibel dan sesuai dengan dinamika di lapangan. Selain itu, metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang bersifat empiris dan deskriptif melalui teknik wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi, yang bertujuan untuk memahami secara utuh peran PIRA dalam proses rekrutmen dan kaderisasi perempuan sebagai calon legislatif. Dengan demikian, pendekatan ini mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap strategi politik yang bersifat kontekstual dan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan untuk mengeksplorasi strategi serta dinamika internal partai politik dalam mendorong keterwakilan perempuan di ranah legislatif.

Pendekatan penelitian ini menggunakan *new institutionalism* atau kelembagaan baru merupakan pendekatan dalam penelitian politik yang menempatkan institusi

sebagai faktor penting dalam menjelaskan perilaku politik, proses kebijakan, dan hasil politik. Menurut March dan Olsen (2006), institusi dipahami sebagai kumpulan aturan, prosedur, norma, serta praktik yang relatif stabil dan membentuk struktur makna serta sumber daya yang mempengaruhi tindakan aktor politik. Institusi tidak hanya menjadi arena interaksi aktor, tetapi juga memiliki peran otonom dalam membentuk preferensi, identitas, serta pola perilaku aktor. Dalam perspektif ini, institusi menciptakan keteraturan dan prediktabilitas dalam kehidupan politik serta membatasi sekaligus memungkinkan tindakan aktor melalui apa yang disebut sebagai *logic of appropriateness*, yaitu tindakan yang didasarkan pada aturan dan norma yang dianggap tepat dalam suatu lembaga. Oleh karena itu, pendekatan kelembagaan baru melihat bahwa perubahan dan hasil politik tidak hanya ditentukan oleh aktor individual atau kekuatan sosial, tetapi juga oleh struktur kelembagaan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan dinamika politik secara keseluruhan.

Pendekatan *new institutionalism* digunakan karena mampu menjelaskan bagaimana institusi membentuk tindakan politik serta mempengaruhi perubahan kebijakan secara sistematis. March dan Olsen (2006) menjelaskan bahwa pendekatan kelembagaan baru berupaya menghindari asumsi yang terlalu menekankan rasionalitas individu dan lebih menekankan aturan, norma, serta rutinitas institusi sebagai unit analisis utama. Pendekatan ini juga menekankan bahwa institusi memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas, mengatur interaksi aktor, serta membentuk pola tindakan yang berulang dalam sistem politik. Selain itu, *New Institutionalism* juga dijelaskan sebagai pendekatan yang memiliki berbagai varian seperti *historical institutionalism*, *rational choice institutionalism*, *constructivist institutionalism*, dan *network institutionalism* yang memungkinkan peneliti melihat fenomena politik dari berbagai aspek kelembagaan seperti interaksi aktor, perubahan kebijakan, pembelajaran sosial, dan jaringan antar lembaga. Dengan demikian, pendekatan kelembagaan baru memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami hubungan antara aktor, institusi, dan proses politik secara lebih mendalam.

Pendekatan *new institutionalism* relevan digunakan dalam penelitian ini karena pendekatan tersebut berfokus pada strategi kelembagaan dan peran organisasi dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya dalam konteks PIRA Gerindra Lampung. Pendekatan ini memungkinkan analisis mengenai bagaimana struktur organisasi partai, aturan internal, norma kelembagaan, serta jaringan politik mempengaruhi peluang keterwakilan perempuan. Selain itu, perspektif kelembagaan baru juga membantu menjelaskan bagaimana perubahan kebijakan partai, proses rekrutmen politik, serta interaksi antara aktor perempuan dan institusi partai dapat membentuk hasil politik yang diharapkan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi faktor kelembagaan yang mendorong maupun menghambat keterwakilan perempuan, sehingga analisis yang dihasilkan lebih komprehensif dan sesuai dengan fokus penelitian yang menekankan strategi organisasi dan dinamika kelembagaan dalam politik.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini di tentukan dengan tujuan memudahkan peneliti untuk melakukan proses penelitian. Menurut Moleong (Widayat, 2020), Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana peneliti menemukan adanya fenomena yang dianggap penting untuk diteliti dan dijadikan sebagai latar dalam proses pengumpulan data. pemilihan lokasi dalam penelitian didasarkan pada landasan teori yang memiliki keterkaitan empiris, yang selanjutnya dirumuskan dalam bentuk data sementara untuk ditelusuri kebenarannya melalui proses penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada beberapa Lokasi, diantaranya DPD Gerindra Provinsi Lampung, DPRD Provinsi Lampung, dan beberapa organisasi terkait.

3.3 Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan penelitian ini untuk mengetahui strategi apa yang digunakan oleh partai Gerindra melalui sayap partainya, yaitu PIRA (Perempuan Indonesia Raya), dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilihan Legislatif 2024. Fokus penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana strategi PIRA Gerindra Lampung diterapkan dalam memperluas partisipasi politik

perempuan dan memperkuat representasi mereka di parlemen, dengan menggunakan kerangka Teori Strategi Kesetaraan Gender yang dikemukakan oleh Squires (2007).

Melalui teori ini, penelitian menelaah strategi PIRA Gerindra berdasarkan tiga pendekatan utama, yaitu strategi inklusi (*inclusion strategy*) yang berfokus pada peningkatan jumlah perempuan dalam politik melalui kebijakan afirmatif, strategi pembalikan (*reversal strategy*) yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan perempuan dalam partai, dan strategi pengarusutamaan gender (*mainstreaming strategy*) yang menekankan integrasi perspektif gender ke dalam seluruh kebijakan dan struktur partai. Dengan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana PIRA Gerindra Lampung berperan dalam mendorong keterlibatan perempuan secara lebih luas, serta menilai sejauh mana strategi yang dijalankan mampu meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pileg 2024.

Tabel 5 Fokus Penelitian

Pendekatan Strategi Kesetaraan Gender Squires (2007)	Fokus Penelitian pada PIRA Gerindra Lampung
Strategi Inklusi (<i>Inclusion Strategy</i>)	Menelusuri bagaimana PIRA Gerindra Lampung berupaya memperluas keterlibatan perempuan dalam politik melalui berbagai kebijakan dan kegiatan afirmatif. Fokusnya mencakup upaya peningkatan jumlah kader perempuan dalam partai, mendorong partisipasi mereka dalam pencalonan legislatif, serta memperkuat kapasitas politik perempuan melalui pelatihan dan pembinaan. Penelitian juga melihat sejauh mana kebijakan partai memberi ruang yang setara bagi perempuan untuk berkompetisi dalam struktur politik formal.
Strategi Pembalikan (<i>Reversal Strategy</i>)	Menganalisis peran kelembagaan PIRA sebagai wadah khusus yang mewakili dan

Pendekatan Strategi Kesetaraan Gender Squires (2007)	Fokus Penelitian pada PIRA Gerindra Lampung
Strategi Pengarusutamaan Gender (<i>Mainstreaming Strategy</i>)	<p>memperjuangkan kepentingan perempuan di lingkungan Partai Gerindra. Kajian ini berfokus pada bagaimana PIRA mengembangkan struktur organisasi, jaringan kerja, serta kegiatan advokasi yang mendukung peningkatan posisi dan peran perempuan dalam politik. Selain itu, penelitian juga menilai bagaimana PIRA menjadi saluran aspirasi dan ruang konsolidasi bagi kader perempuan agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan partai.</p> <p>Mengkaji sejauh mana PIRA Gerindra Lampung berhasil mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan partai. Fokus penelitian meliputi penerapan prinsip gender dalam perumusan visi dan misi partai, mekanisme rekrutmen, serta pengawasan kebijakan internal agar berpihak pada perempuan. Pendekatan ini juga menilai bagaimana PIRA berkontribusi dalam mengubah budaya organisasi partai menjadi lebih terbuka, inklusif, dan sensitif terhadap isu-isu kesetaraan gender.</p>

Sumber : Diolah Peneliti 2026

3.4 Informan

Informan dalam penelitian kualitatif adalah individu yang berasal dari lingkungan tempat penelitian dilakukan dan dianggap memahami secara mendalam berbagai aspek yang berkaitan dengan konteks penelitian tersebut. Mereka dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung terhadap peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang kaya dan relevan bagi kebutuhan penelitian Moleong (2022)

Beberapa informan yang dibutuhkan meliputi :

Tabel 6 Informan

No	Nama	Jabatan	Keterangan/Alasan Pemilihan
1	Elly Wahyuni	Ketua PD PIRA GERINDRA LAMPUNG	Dipilih karena memegang peranan strategis dalam merancang dan mengarahkan kebijakan PIRA Gerindra Lampung, khususnya terkait strategi peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif.
2	Aderly Imelia Sari	Sekretaris PIRA GERINDRA LAMPUNG	Dipilih karena bertanggung jawab dalam koordinasi dan administrasi internal organisasi, serta terlibat langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di bawah PIRA.
3	Purnama Wulan Sari	Ketua Dewan Pembina PIRA GERINDRA LAMPUNG	Dipilih karena berperan sebagai pengarah dan pembina dalam menetapkan visi, misi, dan langkah strategis organisasi dalam mendorong keterwakilan perempuan di Pileg 2024.
4	Asdiana Hansayupa	Kader Partai & PartisipanAktif PIRA Lampung	Dipilih karena merupakan kader partai sekaligus partisipan aktif PIRA Lampung yang terlibat langsung dalam kegiatan kaderisasi dan strategi pencalonan perempuan, sehingga dapat memberikan pengalaman praktis dari sisi lapangan.

No	Nama	Jabatan	Keterangan/Alasan Pemilihan
5	Nirva Diana	Akademisi	Dipilih karena memiliki keahlian akademik, khususnya kajian gender dan politik, serta mampu memberikan analisis ilmiah yang komprehensif mengenai keterwakilan perempuan dalam politik elektoral
6	Aderly Imelda Sari	Sekretaris Organisasi KPPI Lampung	Dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam mengoordinasikan gerakan perempuan politik di daerah, memahami dinamika representasi perempuan dalam partai dan parlemen, serta mampu memberikan perspektif strategis terkait upaya

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber informan yang berbeda guna meningkatkan validitas dan kredibilitas data. Sumber Triangulasi data dalam penelitian ini berasal dari pengurus PIRA Gerindra Lampung sebagai pihak internal yang mengetahui secara langsung strategi dan pelaksanaan program peningkatan keterwakilan perempuan, akademisi yang memberikan pandangan teoritis serta analisis objektif terkait strategi politik perempuan, serta Kaukus Politik Perempuan sebagai pihak eksternal yang memiliki pengalaman dan perspektif dalam mendorong partisipasi perempuan di bidang politik. Melalui triangulasi sumber tersebut, peneliti dapat mengkaji kesesuaian informasi dari masing-masing sumber, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih akurat, komprehensif, dan dapat dipercaya dalam menjelaskan strategi PIRA Gerindra Lampung dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilihan Legislatif 2024.

3.5 Jenis & Sumber Data

Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif memiliki dua sumber data utama yang saling melengkapi, yakni data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini penting untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informan yang terlibat secara aktif dalam strategi peningkatan keterwakilan perempuan di lingkungan Partai Gerindra, khususnya melalui organisasi sayap perempuan PIRA Gerindra Lampung. Informasi primer ini akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pengurus inti seperti Ketua, Sekretaris, maupun Dewan Pembina PIRA Gerindra Lampung. Mereka merupakan sumber utama karena secara langsung memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterlibatan aktif dalam merumuskan dan menjalankan strategi partai dalam mengusung kader perempuan pada Pemilu Legislatif 2024. Wawancara ini menjadi kunci untuk menggali narasi, praktik internal, dan dinamika yang tidak dapat ditemukan dari dokumen tertulis.

2. Data Sekunder

Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan, seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra, peraturan perundang-undangan terkait partai politik dan keterwakilan perempuan, laporan pemilu sebelumnya, serta jurnal ilmiah dan buku yang membahas peran organisasi sayap partai dan strategi politik gender. Data ini digunakan untuk mendukung, memperkuat, serta memberikan konteks teoretis dan normatif atas temuan lapangan yang diperoleh dari data primer. Dengan demikian, data sekunder tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga memberikan fondasi konseptual untuk menafsirkan strategi-strategi yang dilakukan oleh PIRA Gerindra Lampung.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018) Dalam kegiatan penelitian, terdapat dua aspek utama yang sangat memengaruhi mutu data yang diperoleh, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas dalam proses pengumpulan data. Kualitas instrumen berkaitan erat dengan tingkat validitas dan reliabilitas alat ukur yang digunakan, sementara kualitas pengumpulan data berhubungan dengan ketepatan dalam penerapan teknik atau prosedur saat memperoleh data di lapangan. Oleh karena itu, meskipun suatu instrumen telah teruji secara valid dan reliabel secara teoritis, hal tersebut tidak serta-merta menjamin bahwa data yang dikumpulkan juga valid dan reliabel apabila instrumen tersebut tidak digunakan dengan benar dan sesuai prosedur dalam praktik pengumpulan data. Dengan kata lain, keberhasilan penelitian sangat ditentukan oleh sinergi antara kualitas alat ukur dan kecermatan dalam aplikasinya selama proses penelitian berlangsung.

Dilihat dari metode yang digunakan untuk memperoleh data, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik dengan wawancara langsung (*interview*) dan penelusuran dokumen (dokumentasi), yang keduanya memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, atau ketika peneliti memerlukan informasi mendalam dari narasumber dengan jumlah yang relatif sedikit. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih rinci dan kontekstual secara langsung dari sumber informasi. Sugiyono membagi jenis wawancara menjadi dua, yaitu dengan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur yang masing-masing dapat dilakukan dengan melalui tatap muka. Sugiyono, (2018:195).

Dalam penelitian ini Peneliti memilih teknik wawancara tidak terstruktur atau semi terstruktur agar proses penggalian data dapat dilakukan dengan lebih fleksibel dan mendalam. Wawancara akan dilakukan pada tanggal 23 September

sampai dengan 5 november 2025. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan alur wawancara dengan situasi lapangan dan respon dari informan, tanpa terikat pada urutan pertanyaan yang kaku. Dengan demikian, peneliti dapat mengeksplorasi pandangan, pengalaman, serta strategi yang diterapkan oleh PIRA Gerindra Lampung dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Selain itu, penggunaan teknik wawancara ini juga memberi ruang bagi informan untuk menyampaikan informasi tambahan yang mungkin tidak tercantum dalam pedoman wawancara, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih kaya, relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian terkait strategi partai dalam kontestasi politik elektoral pada Pileg 2024.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi menurut Moleong (2014) merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan memperoleh catatan atau dokumen penting yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, sehingga informasi yang diperoleh bersifat lengkap, sah, dan tidak hanya berdasarkan asumsi. Dalam pendekatan kualitatif, dokumentasi berperan sebagai pelengkap untuk memperkuat hasil dari teknik utama seperti wawancara dan observasi. Sementara itu, Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan metode untuk mengakses data melalui buku, arsip, laporan, angka, gambar, atau tulisan lain yang relevan dan mampu menunjang keabsahan hasil penelitian. Singkatnya, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi dari beragam dokumen yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Pada penelitian ini, Jenis dokumen yang digunakan oleh peneliti diantaranya:

1. Dokumen resmi Gerindra & PIRA (AD/ART organisasi).
2. Laporan media dan arsip kegiatan PIRA yang relevan dengan strategi peningkatan keterwakilan perempuan.
3. Undang – undang :
 - Undang - undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 245 yang mengatur tentang Pemilihan Umum dan keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota legislatif.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 29 & Pasal 12 huruf j tentang Partai Politik mengatur tentang pembentukan dan susunan organisasi Partai Politik. Secara lebih rinci, pasal ini membahas tentang bagaimana sebuah partai politik dibentuk dan bagaimana struktur organisasinya diatur.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

4. Berita Online

3. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang memanfaatkan kemampuan manusia dalam menggunakan seluruh panca inderanya, khususnya indera penglihatan, untuk memperoleh informasi dari objek penelitian. Dibandingkan dengan teknik lain seperti wawancara atau kuesioner, observasi memiliki karakteristik yang khas karena data diperoleh langsung melalui pengalaman inderawi peneliti. Keberhasilan observasi sangat bergantung pada kepekaan dan ketelitian pengamat, sebab peneliti tidak hanya melihat, tetapi juga mendengar, mencium, merasakan, serta kemudian menarik kesimpulan dari apa yang diamati secara langsung di lapangan. (Sugiyono, 2018)

3.7 Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengelolaan data merupakan tahapan penting sebelum proses analisis dilakukan. Menurut Bungin (2007:122), pengelolaan data adalah proses menyusun, menyaring, dan menyederhanakan data mentah agar dapat disajikan dan diinterpretasikan secara ilmiah. Data yang telah diperoleh di lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi, perlu diolah secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan bermakna.

Pengelolaan data dilakukan dengan cara merapikan, menyusun, mengorganisasi, dan mengklasifikasi data ke dalam bentuk-bentuk tematik agar memudahkan peneliti dalam menginterpretasi dan menyajikan data. Bungin (2007:122).

Dalam konteks penelitian ini, yang mengkaji strategi Partai Gerindra melalui PIRA dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pileg 2024, teknik pengelolaan data dilakukan dengan langkah-langkah Editing dan Interpretasi Data sebagai berikut:

1. *Editing Data*

1) Penyusunan Data Mentah

Seluruh data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus PIRA, DPD Gerindra, dan caleg perempuan, ditranskrip secara utuh ke dalam bentuk teks naratif. Hal ini sesuai dengan prinsip Bungin (2007) yang menekankan pentingnya menyusun data mentah dalam format yang bisa diolah lebih lanjut.

2) Pembersihan dan Penyaringan Data

Data yang tidak relevan, seperti pernyataan di luar fokus penelitian atau pengulangan, disortir untuk menjaga kejelasan informasi. Data difokuskan pada informasi terkait strategi partai, peran PIRA, bentuk kaderisasi, dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam pencalonan legislatif.

3) Pengorganisasian Data Secara Tematik

Selanjutnya, data diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama, seperti:

- a. Strategi kaderisasi internal oleh PIRA
- b. Dukungan struktural dari partai terhadap caleg Perempuan
- c. Peran Perempuan dalam organisasi Politik
- d. Persepsi terhadap keterwakilan Perempuan

4) Pencatatan Analitik Awal

Selama pengelompokan data, peneliti juga membuat catatan awal terhadap pola-pola strategis yang ditemukan. Catatan ini menjadi dasar dalam melakukan analisis dengan model Miles & Huberman, yaitu reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

2. *Interpretasi Data*

Interpretasi data merupakan tahapan penting dalam penelitian, yakni proses menggunakan beragam metode analisis untuk menelaah, memahami, dan menarik kesimpulan yang relevan dari data yang telah dikumpulkan. Melalui

interpretasi data, peneliti dapat mengklasifikasikan, memanipulasi, dan merangkum informasi sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian secara tepat. Proses ini tidak hanya sekadar membaca hasil analisis, tetapi juga membangun makna dan hubungan antarvariabel yang sedang diteliti. Wijayanto (2020).

Langkah Interpretasi Data :

1) Mengelompokkan Data

Menghimpun data hasil wawancara, observasi, dan dokumen lalu mengorganisasikannya ke dalam kategori atau tema yang sesuai dengan fokus penelitian (misalnya strategi kaderisasi, sosialisasi, dampak keterwakilan perempuan).

2) Menganalisis Pola dan Hubungan

Menelaah hubungan antar-tema untuk menemukan pola, tren, dan sebab-akibat antara strategi PIRA dengan keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Lampung.

3) Menganalisis Pola dan Hubungan

Menelaah hubungan antar-tema untuk menemukan pola, tren, dan sebab-akibat antara strategi PIRA dengan keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Lampung.

4) Menarik Kesimpulan Berdasarkan Teori

Mengaitkan temuan dengan teori strategi politik, lalu menyimpulkan secara sistematis sejauh mana strategi PIRA berdampak pada peningkatan keterwakilan perempuan.

Karena data penelitian sering berasal dari berbagai sumber (misalnya wawancara, dokumentasi, observasi), maka proses interpretasi perlu dilakukan dengan sistematis agar data yang semula terkesan acak dapat disusun menjadi pola yang bermakna. Interpretasi data juga bersifat subjektif-analitis karena menuntut peneliti menggunakan kerangka teori, konteks penelitian, dan pemahaman lapangan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Dalam penelitian tentang strategi Partai Gerindra melalui PIRA Lampung, interpretasi data membantu peneliti memahami

bagaimana strategi yang diterapkan memengaruhi keterwakilan perempuan di politik.

3.8 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber melalui beragam teknik pengumpulan data (triangulasi) yang dilakukan secara berulang hingga data dianggap jenuh. Proses pengumpulan yang terus-menerus ini menyebabkan variasi data menjadi sangat tinggi. Umumnya, data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, meskipun data kuantitatif tidak sepenuhnya ditolak. Namun, karena belum ada pola analisis yang baku dalam pendekatan ini, analisis data kualitatif sering kali menjadi tantangan tersendiri. Seperti yang disampaikan oleh Miles dan Huberman (dalam Ilmiah, 2013), kesulitan utama dalam analisis data kualitatif terletak pada metode analisis yang belum dirumuskan secara jelas.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dan bersifat induktif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi kegiatan, serta telaah dokumen internal PIRA Gerindra Lampung yang berkaitan dengan strategi peningkatan keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif 2024. Mengacu pada Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018), analisis ini dilakukan secara interaktif dan berulang hingga data dianggap jenuh. Terdapat tiga tahapan utama yang saling berhubungan: reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap ini dilakukan untuk menyaring dan memfokuskan data yang relevan dengan fokus penelitian.

- a. Penyaringan data : menyeleksi hasil wawancara dengan pengurus PIRA Gerindra Lampung, kader perempuan, dan pihak pendukung eksternal; hanya informasi yang terkait strategi kaderisasi, dukungan struktural partai, metode rekrutmen calon legislatif perempuan, kegiatan kampanye, serta program penguatan kapasitas politik yang dipertahankan.
- b. Merangkum data : menyusun ringkasan temuan dari dokumen resmi PIRA (misalnya notulen rapat, pedoman kaderisasi, dan program kerja tahunan) agar lebih mudah diidentifikasi sesuai tema strategi.

- c. Mengkategorikan data : mengelompokkan temuan sesuai dimensi strategi (*inclusion, Reversal dan Mainstreaming!*) untuk memetakan posisi PIRA Gerindra Lampung dalam tiap dimensi strategi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disusun agar mudah dibaca dan dianalisis.

- a. Penyusunan narasi : menyajikan hasil wawancara dan dokumen dalam uraian yang menjelaskan bagaimana PIRA menjalankan strategi peningkatan keterwakilan perempuan, misalnya program pelatihan politik atau pendekatan ke masyarakat.
- b. Analisis perbandingan : Mengamati perbedaan dan kesamaan tiap dimensi teori apakah ketiganya diterapkan secara optimal.

3. Penarikan & Verifikasi Kesimpulan (*conclusion Drawing/Verification*)

Tahap ini berfokus pada interpretasi dan pengujian konsistensi temuan lapangan.

- a. Perumusan Kesimpulan sementara : menyimpulkan pola strategi PIRA yang tampak mendukung peningkatan keterwakilan perempuan (misalnya efektivitas kaderisasi, dukungan finansial, atau citra politik).
- b. Verifikasi berkelanjutan : membandingkan hasil wawancara antar informan, dokumen partai, serta observasi kegiatan PIRA untuk menguji keabsahan data.
- c. Penyempurnaan Kesimpulan : mengonfirmasi temuan kunci kepada informan (member check) dan menggunakan triangulasi sumber serta teknik agar hasilnya kredibel.
- d. Hasil akhir : menarik kesimpulan yang sistematis mengenai seberapa jauh strategi PIRA Gerindra Lampung pada tiap level master strategy berkontribusi pada peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif 2024.

3.9 Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data merupakan proses penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan *valid, reliabel*, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada bagian ini, peneliti akan membahas

sejumlah aspek utama, meliputi: pemanfaatan data dan acuannya, evaluasi terhadap keabsahan data yang digunakan sebagai dasar informasi, serta uraian mengenai teknik-teknik yang digunakan dalam menjamin validitas data penelitian.

Menurut Moleong (2021), terdapat empat kriteria utama dalam uji keabsahan data kualitatif

1. *Credibility*

Merupakan upaya untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar- benar mencerminkan realitas dan pengalaman informan. Proses ini dilakukan dengan memperpanjang keterlibatan di lapangan, pengamatan terus-menerus, serta melakukan triangulasi untuk menjamin bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

2. *Transferability*

Mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat dialihkan atau diterapkan dalam konteks lain yang serupa. *Validitas eksternal* ini memungkinkan pembaca menilai apakah temuan penelitian dapat digunakan pada kondisi atau situasi yang berbeda tetapi memiliki karakteristik yang sama.

3. *Dependability*

Menunjukkan konsistensi proses penelitian, yakni sejauh mana prosedur dan hasil yang diperoleh dapat direplikasi dengan hasil yang serupa bila penelitian dilakukan ulang dalam kondisi yang sama. Audit trail atau jejak audit biasanya digunakan untuk menilai aspek ini.

4. *Confirmability*

Berkaitan dengan objektivitas data dan temuan penelitian. *Validitas* ini dicapai ketika data yang diperoleh dapat *diverifikasi* dan ditelusuri sumbernya secara jelas, serta tidak dipengaruhi oleh bias atau subjektivitas peneliti. Konfirmasi kepada berbagai pihak yang relevan dilakukan untuk menjamin bahwa interpretasi data benar- benar sah dan dapat diterima oleh banyak pihak.

Untuk memperkuat validitas data, Moleong (2021) juga menjelaskan konsep triangulasi sebagai pendekatan untuk menguji kebenaran data melalui perbandingan antar sumber informasi, teknik, waktu, maupun teori. Terdapat

beberapa jenis triangulasi yang digunakan, antara lain:

1. Triangulasi Sumber

Merujuk pada perbandingan data dari berbagai narasumber untuk melihat konsistensi informasi. Ibrahim (2018) menyatakan bahwa dalam triangulasi sumber, data yang diperoleh dari satu pihak dibandingkan dengan data dari pihak lain yang relevan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan valid.

2. Triangulasi Teknik

Melibatkan penggunaan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian hasilnya dibandingkan untuk melihat kesesuaian dan konsistensi antar teknik

3. Triangulasi Waktu

Teknik ini dilakukan dengan membandingkan dan mengkaji jawaban informan yang diperoleh selama proses wawancara berlangsung. Sahide (2019) menyatakan bahwa pendalaman selama proses wawancara berlangsung berperan penting dalam memperluas pemahaman peneliti serta menilai konsistensi informasi yang diberikan informan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis teori *Gender Equality Strategies* Squires (2007), strategi peningkatan keterwakilan perempuan yang dijalankan Partai Gerindra melalui PIRA Lampung menunjukkan capaian yang berbeda di setiap dimensinya.

Pada dimensi *inclusion strategy*, PIRA telah berhasil memperluas keterlibatan perempuan dalam politik melalui proses rekrutmen terbuka, pelatihan politik, serta dorongan aktif kepada kader untuk mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif 2024. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah pengurus PIRA yang maju sebagai caleg serta pendampingan politik yang diberikan melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan jumlah dan partisipasi perempuan dalam pencalonan legislatif sudah berjalan dengan baik.

Pada dimensi *reversal strategy*, keberadaan PIRA sebagai organisasi sayap perempuan menjadi ruang penting bagi perempuan untuk membangun jejaring politik dan memperkuat modal sosial. Kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang dilakukan PIRA Lampung secara konsisten membangun kedekatan dengan masyarakat dan memperkuat citra partai. Pendekatan ini merupakan strategi politik jangka panjang yang sejalan dengan kebutuhan elektoral partai. Strategi tersebut juga relevan dengan perkembangan zaman, salah satunya penggunaan jaringan sosial masyarakat dan kegiatan berbasis komunitas untuk meningkatkan dukungan suara.

Namun, pada dimensi *mainstreaming strategy*, penelitian ini menemukan bahwa integrasi isu gender dalam proses perumusan kebijakan partai masih terbatas. PIRA

belum sepenuhnya dilibatkan dalam tahap penentuan arah dan keputusan politik inti, dan lebih berperan sebagai pelaksana kebijakan yang telah dirumuskan di tingkat pusat. Hambatan struktural maupun kultural juga masih menjadi tantangan seperti keterbatasan modal politik dan ekonomi, dukungan keluarga, serta budaya patriarki yang membatasi ruang gerak perempuan. Selain itu, evaluasi dari informan menunjukkan bahwa peningkatan representasi perempuan tidak hanya membutuhkan kemampuan individu, tetapi juga dukungan sistem pendaftaran caleg yang lebih sensitif gender, penguatan program kerja yang tidak hanya berorientasi sosial, serta komitmen tegas partai dalam mendorong pencalonan perempuan.

Beberapa informan menegaskan bahwa internal PIRA sebenarnya memiliki kesiapan melalui wadah kaderisasi yang tersedia, namun keberhasilan perempuan dalam politik membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara partai, keluarga, dan lingkungan sosial. Dengan demikian, kemajuan representasi perempuan di PIRA Gerindra Lampung sudah terlihat pada aspek peningkatan partisipasi dan peran di akar rumput, namun masih perlu penguatan struktural agar perempuan tidak hanya menjadi penggerak lapangan, tetapi juga ikut menentukan arah kebijakan politik partai.

5.2 Saran

- 1) Berdasarkan hasil penelitian, PIRA Gerindra Lampung selama ini lebih sering terlibat sebagai pelaksana dan pendukung program partai, khususnya yang bersifat sosial dan kampanye. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan akses perempuan pada ruang perumusan kebijakan dan strategi partai, baik dalam agenda kaderisasi, penentuan calon legislatif, maupun penyusunan program politik. Pelibatan ini penting agar isu dan kepentingan perempuan dapat terakomodasi sejak awal, bukan hanya pada tahap implementasi.
- 2) Program pelatihan yang selama ini dilakukan masih berfokus pada persiapan menjelang pemilu. Ke depan, pembinaan politik bagi perempuan harus dilakukan secara rutin, bertahap, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas kepemimpinan, kemampuan advokasi, serta pemahaman terhadap isu gender dalam politik. Kerja sama dengan organisasi pendamping perempuan seperti

DAMAR dan KPPI perlu diperluas agar perempuan memiliki kompetensi yang lebih komprehensif sebelum maju sebagai caleg.

- 3) Hasil penelitian menunjukkan hambatan utama bukan berasal dari partai, melainkan faktor internal seperti keterbatasan dukungan keluarga (khususnya suami), waktu, dan modal kampanye. Karena itu diperlukan strategi dukungan yang lebih sistematis termasuk manajemen kampanye, bantuan finansial yang transparan, serta pendampingan psikologis dan keluarga bagi calon perempuan agar mereka memiliki daya saing yang setara di kontestasi elektoral.
- 4) Kegiatan sosial yang dilakukan PIRA selama ini berhasil membangun basis dukungan publik, namun orientasinya perlu diperluas menjadi strategi politik jangka panjang yang mengarusutamakan kepentingan perempuan. Program seperti pemberdayaan ekonomi, keagamaan, kesehatan, dan UMKM perlu diintegrasikan dengan advokasi kebijakan yang memperkuat posisi perempuan baik dalam struktur partai maupun lembaga legislatif.
- 5) Setiap periode pemilu harus disertai evaluasi yang jelas terkait jumlah caleg perempuan, tingkat keterpilihan, efektivitas kampanye, serta hambatan yang muncul. Selain itu, perlu diperkuat jejaring dengan komunitas perempuan, tokoh masyarakat, serta lembaga pemerintah untuk memperluas sumber daya dan dukungan elektoral perempuan dalam politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asroni, A. 2013. Muhammad Yusup, Dan Adib Sofia, Dakwah Dan Politik: Menakar Kontribusi Organisasi Islam Sayap Partai Politik Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta, *Jurnal Dakwah, Volume (XIV) Nomor 1, Hlm. 29.*
- Amal, Ichlasul. 1988. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta, Wacana, Yogya.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. 2019. *Democracy For Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, Dan Negara Di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aula, M. R. 2023. Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. *Politikom Indonesiana*, 4(1).
- Ayu, R. S., Putri, D. A., & Lestari, M. 2024. Dampak Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Politik Perempuan Di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. *ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 1–14.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi Keempat*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana. ISBN: 978-979-3925-63-5.
- Darmastuti, A. 2017. *Hak Politik Dan Partisipasi Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera*. Lampung : AURA
- Fautanu, I., Buhori, M., & Gunawan, H. 2020. Politik Identitas Dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid. *Politicon*, 2(2), 87-112.
- Fauziah, M. N., Rizki, M. F., & Ramdani, R. 2023. Tantangan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Formal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 12-22.
- Fernandez, F., Dkk. 2021 Affirmative Action: Studi Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Partai Golongan Karya Di Kabupaten Magetan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JUISPOL)*, 3(2), 106-116.

- Gesuri.Id. 2023, 5 Mei. Peran Perempuan Dalam Politik Terus Meningkat. <https://www.gesuri.id/pemilu/dari-18-anggota-dprd-perempuan-lampung-paling-banyak-berasal-dari-pdi-perjuangan-b2k36zmdy>. Diakses Pada 21 Juli 2025.
- Gunawan, W., & Nurdin. 2024. Analisis Penerapan Kuota Gender Kandidat Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu Legislatif 2024. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 123–134.
- Hafiz, F.,Dkk. 2025. Inkonsistensi Aturan Keterwakilan Perempuan Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 Dalam Perspektif Feminis Legal Teori. *PUAN INDONESIA, VOL 6 (2) 623 – 632*
- Haris, S.,Dkk . 2016. *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia*. Jakarta: KPK–LIPI.
- Haryanto, T. J., Yahya, A. A., Prastin, I. S., & Fatkhuri. 2024. Pendidikan Politik Dan Penguatan Kapasitas Perempuan Dalam Partisipasi Politik. *Jurnal Demokrasi Dan Tata Kelola Politik (DTKP)*, 6(2), 45–60.
- Hurriyah, & Wildianti, D. 2020. Partisipasi Tanpa Representasi: Analisis Relasi Organisasi Sayap Perempuan Dengan Partai Politik Di Indonesia.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. 1976. *No Easy Choice: Political Participation In Developing Countries*. Harvard University Press.
- Ibrahim, M. 2018. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jurdi, F. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Kadir, A. G. 2014. Dinamika Partai Politik Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 16(2), 132-136.
- Kompas.Id. 2024, 8 Oktober. Senator Perempuan Di DPD RI Meningkatkan Signifikan.,Dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/10/07/pemilu-2024-tingkatkan-jumlah-senator-perempuan-di-dpd> Diakses Pada 21 Juli 2025
- Kusmanto, H. 2013. *Peran Badan Permusyawaratan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*.
- Lestari, S., & Hertanto. 2024. Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu Kadal 2024 Di Provinsi Lampung. *Pelita : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 24(2), 47 – 59
- Lovenduski, J. & Norris 2008. *Gender And Party Politics*. SAGE Publications. University Of Virginia
- Milles, Matthew B & Huberman, A. Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Alih Bahasa: Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

- Mikkelsen, B. 2005. *Methods For Development Work And Research: A New Guide For Practitioners (2nd Ed.)*. SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufrikhah, S. 2020. Keterbatasan Kuota Perempuan Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Lokal: Studi DPRD Jawa Tengah. *Jurnal Politik Walisongo*, 2(1), 45–60.
- Priandi, R., & Roisah, K. 2019. Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106-116.
- Purwaningsih, T., & Rubiyati, R. 2019. Political Recruitment Of Female Candidates In Meeting The Quota Policy In The Prosperous Justice Party (PKS) Of Yogyakarta Special Region In The 2019 Election. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 10(1), 1–15.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. 2024. Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman. *Journal Of Management, Accounting, And Administration*, 1(2), 77-84.
- Rakhmawati, R. 2024. Puanagrafi: Edukasi Representasi Etnografi Spiritual Menuju Pilar Sdg S Nomor 5 Grand Design Keterwakilan Perempuan. *Penaemas*, 2(2), 400-409.
- Rhodes, R. A. W., Binder, S. A., & Rockman, B. A. (Eds.). (2006). *The Oxford handbook of political institutions*. Oxford University Press.
- Ropii, I. 2019. Peranan Dan Dukungan Organisasi Sayap Terhadap Partai Politik. *Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik*, 258.
- Sahide, M. A. K. 2019. Paradigma Penelitian Kualitatif. Makassar: *La Ode Academic Press*.
- Salusu, J. 2006. *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Sonny E. Udjaili, Peran Organisasi Sayap Partai Politik, Diakses 22 Juli 2025 Dari <https://sonnyudj.wordpress.com/2017/02/03/peran-organisasi-sayap-partai-politik/>
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Suryana, C. 2007. *Pengolahan Dan Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

- Squires, J. 2015. *The New Politics Of Gender Equality*. New York : Palgrave Macmillan.
- Ummah, A., Dkk. 2023. Strategi Dalam Meningkatkan Representasi Politik Perempuan Di DPRD Bali. *JDPL (Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal)*. Vol 5(2).
- Umar, H. 2001. *Strategic Management In Action: Konsep, Teori, Dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis (Strategic Business Unit) Berdasarkan Konsep Michael R. Porter, Fred R. David, Dan Wheelen-Hunger (Eds. Ke- 2)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 245 Yang Mengatur Tentang Pemilihan Umum Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Anggota Legislatif.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 29 & Pasal 12 Huruf J Tentang Partai Politik Mengatur Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Partai Politik. Secara Lebih Rinci, Pasal Ini Membahas Tentang Bagaimana Sebuah Partai Politik Dibentuk Dan Bagaimana Struktur Organisasinya Diatur.
- Wijayanti, S. N., & Iswandi, K. 2021. Peran Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Kaderisasi Partai Politik Di Indonesia. *Sasi*, 27(4), 475-491.
- Wijayanto, G., Madiawati, P. N., Vikaliana, R., Zaenurrohman, J. A., Luthfiana, D., Wali, M., Safitri, N. M., Leo, M., Arikarani, Y., Sukmasetya, P., Sakkir, G., & Jushermi. 2022. *Metode Riset Berbasis Digital: Penelitian Pasca Pandemi*. Bandung: CV Media Sains Indonesia. ISBN 978-623-362-608-8.